

**PENERAPAN NILAI-NILAI HUKUM EKONOMI ISLAM PADA
PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH (Studi pada Bank BNI
Syariah Cabang Pangkep)**



Tesis

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Megister dalam Bidang Syari'ah/Hukum Islam
Pascasarjana UIN Alauddin
Makassar**

Oleh:

Nursalam Rahmatullah

NIM: 80100216009

Promotor:

Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara, M.Ag.

Kopromotor:

Dr. Achmad Musyahid, M.Ag.

**PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nursalam Rahamatullah

NIM : 80100216009

Tempat/Tgl. Lahir : Poso, 17 Maret 1995

Jur/Prodi/Konsentrasi: Hukum Islam

Fakultas/Program : Pascasarjana

Alamat : JL. Dr. Ratulangi LR. 1, No. 12

Judul : Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada Produk-Produk Perbankan Syariah (Studi pada Bank BNI Syariah Cabang Pangkep)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Juli 2018

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

NURSALAM RAHMATULLAH

NIM: 80100216009

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "*Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada Produk-Produk Perbankan Syariah (Studi pada Bank BNI Syariah Cabang Pangkep)*", yang disusun oleh Saudara Nursalam Rahmatullah NIM: 80100216009, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 19/07/2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **06/11/1439** Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang **Hukum Islam** pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

PROMOTOR:

1. Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara, M.Ag.

(.....)

KOPROMOTOR:

1. Dr. Achmad Musyahid, M.Ag.

(.....)

PENGUJI:

1. Dr. Muh. Sabri AR, M.Ag.

(.....)

2. Dr. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.

(.....)

3. Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara, M.Ag.

(.....)

4. Dr. Achmad Musyahid, M.Ag.

(.....)

Makassar, 23 Juli 2018

Diketahui oleh:

Direktur Pascasarjana
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.
NIP. 198612311987031022

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta, atas izin-Nya jua, sehingga Tesis dengan judul “Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada Produk-Produk Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Bni Syari’ah Cabang Pangkep)”, dapat terselesaikan. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw., sebagai suri teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu mengangkat derajat manusia dari lembah kemaksiatan menuju alam yang mulia, yang dengannya manusia mampu berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban menuju kepada satu masa yang berperadaban.

Disadari sepenuhnya, bahwa penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan andil dari mereka semua, baik materil maupun moril. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.SI. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
3. Bapak Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara, M.Ag. (Promotor) dan Dr. Achmad Musyahid, M.Ag. (Kopromotor), atas saran, arahan, bimbingan, masukan, dan motivasinya dalam proses penyelesaian tesis ini.
4. Kedua orang tua penulis yang teramat mulia, Ayahanda Rahmatullah dan Ibunda St. Aminah yang telah mendidik serta, membesarkan penulis sehingga dapat menapaki jenjang pendidikan Strata II (S2).

5. Para Profesor dan Dosen di lingkungan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar atas keikhlasannya memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi, serta segenap Staf Tata Usaha di lingkungan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
6. Semua pihak dan rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar tahun akademik 2016-2017, yang tidak sempat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, motivasi, kritik, dan kerjasamanya selama penyusunan tesis ini.

Tesis ini merupakan sebuah karya yang sarat dengan kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Kritik dan saran sangat diharapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Makassar, 23 Juli 2018

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM
NURSALAM RAHMATULLAH
NIM: 80100216009
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRASLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-14
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	15-74
A. Tinjauan Umum Tentang Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam.....	15
1. Pengertian Ekonomi Syariah dan Tujuannya.....	15
2. Pengertian dan Tujuan Ekonomi Islam	17
3. Prinsip-prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah.....	22
4. Ekonomi Syariah Dilihat dari Aspek Fikih Mualamalah.....	28
5. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Produk-Produk Perbankan Syariah.....	62
1. Pengertian Bank Syariah.....	62
2. Karakteristik Bank Syariah.....	65
3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah.....	66
4. Dasar Hukum Bank Syariah.....	67
5. Tujuan Bank Syariah.....	78
6. Produk produk Bank Syariah.....	69
C. Kerangka Konseptual.....	73
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	75-83
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	75
B. Pendekatan Penelitian.....	77
C. Sumber Data.....	77
D. Metode Pengumpulan Data.....	78

E. Instrumen Penelitian.....	80
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	81
G. Pengujian Keabsahan Data.....	82
BAB IV IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM EKONOMI ISLAM PADA PRODUK-PRODUK BANK BNI SYARIAH CABANG PANGKEP	
DAFTAR PUSTAKA.....	84-116
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	84
B. Hasil Penelitian.....	87
1. Bentuk dan Sistem Pengelolaan Produk-Produk Bank BNI Syariah Cabang Pangkep.....	89
2. Implementasi Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada Produk-Produk Bank BNI Syariah Cabang Pangkep.....	100
3. Respon Nasabah serta Tanggapan Balik Bank BNI Syariah Cabang Pangkep terhadap Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam yang Diterapkan pada Produk-Produk Bank BNI Syariah.....	109
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Implikasi Penelitian.....	119
KEPUSTAKAAN.....	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab Latin*

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئَئِ	<i>fathah</i> dan <i>yā</i>	ai	a dan i
ئَوُ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اُ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	a	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	i	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. Daftar Singkatan

Beberapa daftar singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānahu wa ta’ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al sallām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS...../: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	= صفحة
دم	= بدون
صلعم	= صلى الله عليه و سلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
بخ	= آخره/آخرها
ج	= جزء

ABSTRACT

Name : **Nursalam Rahmatullah**
Student Reg. No. : 80100216009
Concentration : Sharia/Islamic Law
Title : The Implementation of Islamic Economic Law Values on
Sharia Banking Products (A Study at BNI Sharia of Pangkep
Branch)

The study examined "The Implementation of Islamic Economic Law Values on the Products of BNI Sharia of Pangkep Branch" with three problems namely, 1. How are the form and system of products management of BNI Sharia of Pangkep Branch? 2. How is the implementation of Islamic economic law values on the products of BNI Sharia of Pangkep Branch? 3. How are the customers' responses and feedback of the BNI Sharia of Pangkep Branch towards the implementation of Islamic economic law values applied to the products of BNI Sharia?

To discuss the problems, the descriptive qualitative data were collected through library and field research conducted at BNI Sharia of Pangkep Branch. The normative juridical and sociological approaches were employed in collecting the data obtained by techniques of observation, interview, and documentation processed using data reduction analysis, data presentation and drawing conclusions.

Based on the study results, one of the five values of Islamic economic law that has not been optimally implemented was the existing element of *garar* in microfinance products where the bank as a seller selling an object of goods that have not owned. It was happened due to several factors such as: 1. The fulfillment of hard-to-reach annual targets, 2. The dishonest and closed clients concerning the proposed financing purposes, 3. The clients demanding liquidation as soon as possible, and 4. The employees of BNI Sharia of Pangkep Branch particularly did not understand the nature and legal consequences of sale and purchase of *garar* coupled with the lack of customers' understanding related to *murabahah bi al-wakalah* so that the process of financing with a predetermined flow cannot be executed according to the rules in force.

The implications of the study were 1) the Sharia Supervisory Board (SSB) should be more intensively supervise the sharia financial institutions under its supervision, 2) the BNI Sharia Micro Branch Manager of Makassar Branch and the internal auditor should immediately evaluate the work of Unit Leaders and employees who were under the ranks and support each other to carry out the Sharia supervisory function, 3) the materials of Islamic economics basic principles should be more deepened through an assessment applied to employees of BNI Sharia particularly at BNI Sharia Micro of Pangkep Branch.

ABSTRAK

Nama : Nursalam Rahmatullah
NIM : 80100216009
Konsentrasi : Syariah/Hukum Islam
Judul : Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam Pada Produk-Produk Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Bni Syariah Cabang Pangkep)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji “Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam Pada Produk-Produk Bank BNI Syariah Cabang Pangkep” dengan tiga permasalahan yakni, 1. Bagaimana bentuk dan sistem pengelolaan produk-produk bank BNI Syariah cabang Pangkep?, 2. Bagaimana implementasi nilai-nilai hukum ekonomi Islam pada produk-produk bank BNI Syariah cabang Pangkep?, 3. Bagaimana respon nasabah serta tanggapan balik pihak bank BNI Syari’ah Cabang Pangkep terhadap penerapan nilai-nilai hukum ekonomi Islam yang diterapkan pada produk-produk Bank BNI Syari’ah?

Untuk membahas permasalahan tersebut dilakukan pengumpulan data dengan sistem *library research* (kepuustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Bank BNI Syariah Cabang Pangkep. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi diolah menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat satu dari lima nilai-nilai hukum ekonomi Islam yang belum diterapkan secara maksimal yakni, masih terdapat unsur *garar* dalam produk pembiayaan mikro dimana pihak bank selaku penjual memperjualbelikan suatu objek barang yang belum dimiliki. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain. 1. Pemenuhan target tahunan yang susah dicapai, 2. Nasabah yang kurang jujur dan tertutup perihal tujuan pembiayaan yang diajukan, 3. Nasabah yang menuntut pencairan secepat mungkin. dan 4. Pegawai Bank BNI Syariah Cabang Pangkep secara khusus belum paham hakikat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli *garar* ditambah dengan kurangnya pemahaman para nasabah terkait akad *murabahah bi al-wakalah*. Sehingga proses pembiayaan dengan alur yang telah ditentukan tidak dapat dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

Implikasi dari penelitian ini ialah 1) Agar Dewan Pengawas Syariah (DPS) lebih intens mengawasi lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, 2) Agar Pimpinan Area Mikro BNI Syariah Cabang Makassar bersama audit internal dengan segera dapat melakukan evaluasi kerja para Pimpinan Unit dan karyawan yang berada di bawah jajarannya serta saling bahu-membahu menjalankan fungsi pengawasan syariah, 3) Agar materi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lebih diperdalam melalui assesment yang diberlakukan bagi karyawan BNI Syariah khususnya BNI Syariah Mikro Cabang Pangkep.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai kesempurnaan Tuhan, maka segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan, antara lain ada yang ditakdirkan untuk hidup dengan kekayaan yang melimpah tapi ada pula yang hidupnya terbatas dan serba kekurangan. Bagi yang kekurangan tentu senantiasa berusaha menutupi kekurangannya termasuk dengan memohon bantuan kepada mereka yang telah berkecukupan, baik melalui bentuk kerja sama maupun melalui bentuk utang-piutang. Bagi mereka yang berkecukupan saja tetap berusaha meningkatkan apa yang telah diperoleh dari setiap usahanya, apalagi terhadap mereka yang serba kekurangan.

Setiap orang merasakan kekurangan yang selalu membuat susah tetapi kelebihan juga tetap menyusahkan, menyimpan barang di samping membutuhkan biaya pemeliharaan juga jika dibiarkan begitu saja, nilainya dapat berkurang dan bahkan dapat rusak dan tidak mempunyai nilai, buah-buahan akan membusuk dalam waktu beberapa hari dan bangunan akan lapuk dalam beberapa tahun bila dibiarkan begitu saja tanpa pemeliharaan dan biaya yang cukup, demikian pula uang bila disimpan begitu saja nilainya akan berkurang bahkan suatu ketika bisa tidak mempunyai nilai lagi kecuali bila terus menerus dikembangkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dalam perekonomian ditempuh sistem perekonomian yang berbasis riba baik melalui peminjaman dengan konsep bunga sederhana maupun dengan konsep bunga berbunga.

Seorang individu atau perusahaan dan perbankan dalam waktu yang relatif singkat mengalami keuntungan besar dan dinilai oleh banyak orang sebagai suatu kesuksesan besar. Pandangan seperti ini muncul akibat dalam realitas kehidupan, banyak orang yang memandang sesuatu semata-mata dari hasilnya dan mengabaikan

proses yang seharusnya dilakukan untuk mencapainya. Dalam kegiatan bisnis misalnya, perhitungan yang ada dalam pikiran mereka hanyalah keuntungan besar, tidak mempermasalahkan lagi apakah hal tersebut diperoleh melalui bunga yang menyebabkan sekian banyak orang dan perusahaan menjadi bangkrut karena terlilit utang akibat bunga. Cara-cara untuk memperoleh hal tersebut tentu bertentangan dengan syariah Islam. Syariah Islam mengutamakan proses, kerja dan amal, bukan semata-mata pada hasil yang dicapainya.¹

Tuntutan perkonomian dalam syariah Islam, para pemilik modal dalam berusaha harus selalu membagi keuntungan di antara mitra usaha, baik melalui sistem *muḍārabah* maupun *musyārahah*. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk menyejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum.²

Syariah Islam adalah ajaran yang bersifat universal yang merangkum seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara ritual melalui ibadah maupun secara sosial melalui *Mu'āmalah*. Melalui ibadah diharapkan manusia senantiasa berhubungan dengan Allah sebagai *Khāliq* (Pencipta semesta alam); sedangkan melalui hubungan *Mu'āmalah* diharapkan agar manusia senantiasa menjaga keharmonisan terhadap sesama manusia dalam kehidupan sosial. Hal ini berarti setiap individu akan diperhitungkan hak-haknya sesuai dengan kontribusinya dan setiap individu harus dibebaskan dari eksploitasi dari individu lainnya. Syariah Islam membenarkan setiap individu memiliki kekayaan melebihi individu lainnya sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar tidak merugikan orang lain dan tidak diperoleh dengan sistem

¹Didin Halidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 130.

²Mustafa Edwin Nasutio, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 24.

monopoli dan selain dari pada itu harus memenuhi kewajibannya berupa mengeluarkan zakat serta memenuhi kebaikan-kebaikan seperti berinfak dan bersedekah.

Perbankan syariah pada dasarnya dalam hal tertentu sama dengan perbankan konvensional yakni berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana yang telah terkumpul kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaannya dengan perbankan konvensional adalah perbankan syariah melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil serta tidak berdasarkan bunga (*interest*) karena bunga atau riba diharamkan dalam Islam.

Perbankan syariah menempuh cara berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian yang dalam istilah perbankan dikenal dengan *profit and loss sharing* (PLS), Bank Syariah mengajak masyarakat berpartisipasi dalam bidang usaha yang didanai melalui simpanan masyarakat dan kemudian masyarakat penyimpan dana atau deposan mendapatkan bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dalam perbankan syariah terjalin kemitraan antara para deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber daya deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Permasalahan yang muncul adalah adanya tanggapan sebagian masyarakat bahwa antara perbankan konvensional dan perbankan syariah tidak mempunyai perbedaan yang mendasar misalnya: istilah pembiayaan syariah hanyalah kata lain dari pada bunga dan kalau bunga atau riba diharamkan dalam Islam sebab hanya menguntungkan pemilik modal dan mencekik nasabah atau para peminjam, ternyata dalam banyak hal pembiayaan syariah juga sering lebih tinggi dari pada bunga bahkan dalam administrasinya terkadang dirasakan berbelit-belit dan kemungkinan menjadi faktor membengkaknya biaya-biaya yang diperlukan. Dalam kaitan ini satu hal yang

harus menjadi fokus bahwa syariah Islam selalu memperhitungkan tentang kehalalan bukan faktor murah atau mahal.

Perbankan syariah dikenal sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga seperti bank konvensional, melainkan dengan bagi hasil yang tidak saja berdimensi materiil belaka tetapi juga dituntut unsur immateriilnya. Hal yang terakhir itulah yang menjadi ciri khas dalam pengelolaan keuangan dalam perbankan syariah.

Sutan Remy Sjahdeini, mengemukakan bahwa bank syariah sama halnya dengan bank konvensional, bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian.³ Sultan Remy Sjahdeini, dalam kata pengantarnya mengemukakan bahwa perbankan Islam merupakan fenomena baru yang perkembangannya telah mengejutkan para pengamat perbankan konvensional. Bahkan, bank-bank besar dari negara non muslim juga telah memasuki pasar perbankan Islam dengan membuka *Islamic window*. Ajaran Islam, melarang transaksi yang berbasis bunga sehingga semua transaksi harus berdasarkan sistem bagi hasil.⁴ Perbankan syariah lahir sebagai tuntutan dari masyarakat muslim yang menginginkan sistem perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam, yakni suatu sistem perbankan tanpa sistem bunga, karena Islam melarang praktek-praktek transaksi yang mengandung unsur perjudian (*maysir*), penipuan (*gharar*) dan bunga (*riba*). Dalam hal ini jelas bahwa yang menjadi latar belakang lahirnya perbankan syariah adalah untuk membebaskan perbankan dari sistem bunga.

Menurut *Hand Book of Islamic Banking*, tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen

³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005). h. 1.

⁴Marvin K. Lewis dan Latifa M. Algaud, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek, Prospek* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 14.

keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma-norma syariah. Bank syariah berbeda dengan bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif dalam proses pengembangan sosio-ekonomis negara-negara Islam. Perbankan syariah bukan ditujukan terutama untuk memaksimalkan keuntungannya sebagaimana halnya sistem perbankan yang berdasarkan bunga, melainkan untuk memberikan keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang muslim.⁵ Dalam hal ini M. Umer Chapra mengemukakan bahwa suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat diperkenalkan pada semua pembiayaan bank. Pembiayaan perbankan Islam harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Usaha yang sungguh-sungguh harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disediakan oleh bank-bank Islam tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau meningkatkan konsumsi meskipun sistem Islam telah memiliki pencegah untuk menangani masalah ini.⁶ Dalam hal ini perbankan konvensional, selisih antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada para nasabah penyimpan dana, maka itulah yang menjadi sumber keuntungan bagi bank yang bersangkutan. Sedangkan perbankan syariah menawarkan keuntungan usaha dalam bentuk *al-muḍārabah*; *al-musyārahah* dan dalam bentuk *al-murābahah*.

Secara riil perbankan konvensional telah mampu memenuhi fungsi mobilisasi dan penyaluran dana masyarakat sejalan dengan prinsip tersebut di atas, kalau demikian mengapa masih diperlukan perbankan syariah. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa perbankan syariah sistemnya sangat berbeda dengan sistem yang ada dalam perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan syariah merupakan sub-sistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya jauh lebih luas.

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, h. 21.

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, h. 21-22.

Perbankan konvensional banyak yang sejalan dengan prinsip-prinsip sistem keuangan dalam perbankan syariah, namun terdapat perbedaan yang sangat mendasar, yaitu menerima dan membayar bunga (*ribā*) membiayai kegiatan produksi dan perdagangan yang terlarang dalam Islam seperti minuman keras, perjudian. Jadi jelas tak dapat disangkal bahwa perbankan syariah telah mengadopsi banyak sistem dari perbankan konvensional namun hal itu tidak menjadi masalah sepanjang tidak ada larangannya dalam ajaran Islam.

Bunga dan bagi hasil keduanya memberikan keuntungan, namun memiliki perbedaan yang mendasar sehingga syariah Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Perbedaan ini muncul akibat adanya perbedaan investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung resiko dan mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko, karena adanya prosentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.

Menyimpan uang dalam perbankan syariah termasuk kategori investasi. Besar kecilnya perolehan kembalian itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. Dengan demikian bank syariah tidak hanya sekedar menyalurkan uang, melainkan bank syariah harus terus menerus berusaha meningkatkan mutu sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana.

Ajaran Islam mencakup pemenuhan kebutuhan manusia sehingga manusia dapat mencapai pendapatan minimum dan berkecukupan dalam standar hidup tidak menjadi larangan, tetapi harus selalu menjadi pusat perhatian terhadap distribusi pendapatan sehingga yang kekurangan dapat memenuhi sebagian kebutuhannya yang bersumber dari orang-orang yang berkecukupan. Dalam pengembangan kepemilikan khususnya melalui perbankan, berpegang pada ketentuan bagi hasil sehingga

keuntungan tidak selamanya jatuh kepada pemilik modal dan kerugian selalu pada pihak yang kekurangan, tetapi kalau beruntung sama-sama untung dan kalau merugi sama-sama menanggung kerugian. Hal ini tampak bahwa perbankan syariah lebih menonjolkan sisi keadilan dengan mengedepankan prinsip kemitraan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa di Indonesia mulai banyak perbankan yang membuka cabang syariah antara lain BRI Syariah, BNI Syariah, Syariah Mandiri dll. di samping itu bank-bank tersebut juga mulai berkopetensi untuk menunjukkan keunggulan dari tiap produk-produknya. Kopetensi tersebut dapat dilihat melalui surat kabar yang memberitakan bahwa Majalah Investor memberikan penghargaan kepada para pelaku keuangan syariah. Meliputi 12 institusi keuangan syariah terbaik, delapan produk keuangan syariah terbaik, serta tiga tokoh syariah terbaik.

PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) pun berhasil menyabet salah satu penghargaan itu untuk kategori Bank Syariah Terbaik dengan Aset di atas Rp 10 triliun. Berdasarkan penilaian dewan juri yang terdiri dari pakar industri keuangan syariah, BNIS mampu mengungguli Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah, serta Bank Muamalat dalam hal efisiensi, risiko, pertumbuhan, prudence, dan CSR.

Berdasarkan data inilah peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian pada BANK BNI Syariah terkhusus pada BNI Syariah cabang Pangkep yang merupakan satu dari dua cabang dengan tingkat pemasukan yang dikategorikan stabil di tiap tahunnya jika dibandingkan dengan cabang lainnya di area makassar selama 5 tahun terakhir mulai didirikan pada tanggal 1 Februari 2012 hingga saat ini dengan judul penelitian Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada Produk-Produk Perbankan Syariah (Studi pada Bank BNI Syariah Cabang Pangkep).

B. *Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus*

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada permasalahan tentang: “Penerapan Nilai-Nilai Hukum Islam pada Produk-Produk Perbankan Syariah studi pada Bank BNI Syariah cabang Pangkep yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Nilai-nilai hukum ekonomi Islam, dan
- b) Produk-produk Bank BNI Syariah Cabang Pangkep

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian tersebut terdapat dua variabel penelitian yang akan digambarkan secara singkat agar pembaca tidak keliru dalam memahami fokus penelitian ini.

Pertama penerapan nilai-nilai hukum ekonomi Islam, pada dasarnya penerapan adalah perbuatan menerapkan.⁷ Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

1. Adanya program yang dilaksanakan.
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat atau lembaga yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

⁷Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 1598.

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.⁸

Sedangkan nilai-nilai hukum ekonomi Islam ialah nilai-nilai yang lahir dari ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad saw. tapi perlu diketahui bahwa nilai-nilai hukum ekonomi Islam yang dimaksud dalam penulisan tesis ini ialah nilai-nilai hukum Islam yang lahir dan berkembang dari kegiatan ekonomi antara lain 1) *Amar ma'rūf nahyi munkar*, 2) *Ta'āwun*, 3) Keadilan, 4) Non riba, 5) Non *garar* dalam mendapatkan harta.

Selanjutnya produk-produk perbankan syariah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak semua produk perbankan syariah menjadi fokus penelitian pada penyusunan tesis ini melainkan hanya sebagian produk yang diduga kuat masih belum menerapkan nilai-nilai hukum ekonomi Islam secara menyeluruh. Hal ini tentu diperoleh berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan oleh si peneliti antara lain: 1) Produk pembiayaan yang meliputi: mikro 2, mikro 3 dan *murābahah* emas dengan akad *murābahah / murābahah bi al-wakālah*, 2) Produk dana khusus tabungan dengan akad *muḍārabah*.

Penelitian ini berupaya mengungkapkan apa yang dimaksud dengan nilai-nilai hukum ekonomi Islam serta mengkaji sejauh mana nilai-nilai tersebut diterapkan pada produk-produk Bank BNI Syariah Cabang Pangkep. Dengan menganalisa proses masuk dan penyaluran dana serta tata cara pelaksanaan akad yang diterapkan pada setiap produk yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah kepada nasabah/calon nasabahnya.

⁸Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Negara* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 45.

NO	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam	Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam yang meliputi: 1) <i>Amar ma'rūf nahyi munkar</i> , 2) <i>Ta'āwun</i> , 3) Keadilan, 4) Non riba, dan 5) Non <i>garar</i> dalam mendapatkan harta.
2	Produk-Produk bank BNI Syariah Mikro Cabang Pangkep	1) Produk pembiayaan yang meliputi: mikro 2, mikro 3 dan <i>murābahah</i> emas dengan akad <i>murābahah</i> / <i>murābahah bi al-wakālah</i> , 2) Produk dana khusus tabungan dengan akad <i>muḍārabah</i> .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada Produk-Produk Perbankan Syariah (Studi pada Bank BNI Syariah Cabang Pangkep. Dari pokok masalah tersebut dirumuskan sub permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan sistem pengelolaan produk-produk bank BNI Syariah Cabang Pangkep?
2. Bagaimana implementasi nilai-nilai hukum ekonomi Islam pada produk-produk bank BNI Syariah Cabang Pangkep ?
3. Bagaimana respon nasabah serta tanggapan balik pihak bank terhadap penerapan nilai-nilai hukum ekonomi Islam yang diterapkan pada produk-produk Bank BNI Syariah?

D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Mengenai judul tesis tersebut, peneliti telah melakukan penelusuran, baik terhadap judul buku maupun hasil-hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, telah ditemukan berbagai uraian dan analisa baik dalam bentuk buku

maupun dalam bentuk hasil penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi dan artikel hukum yang relevan dengan judul tesis penulis yaitu: Penerapan Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada Produk-Produk Perbankan Syariah (studi pada Bank BNI Syariah Cabang Pangkep)''.

1. Disertasi "Pengaruh Perubahan Organisasi, Stres Kerja dan Inovasi Produk terhadap Kinerja Sumberdaya Insani pada PT Bank BNI Syariah cabang Makassar oleh Nur Ifna. Menegaskan bahwa perubahan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sumberdaya insani pada PT Bank BNI Syariah cabang Makassar. Akan tetapi penelitian ini sama sekali tidak memberi gambaran tentang nilai-nilai islami yang diterapkan oleh sumberdaya insani di perbankan tersebut yang kemungkinan memiliki pengaruh positif yang lebih besar terhadap kinerja para pegawainya.
2. Buku "Produk Perbankan Syariah oleh Wiroso SE MBA. Buku ini menjelaskan produk-produk perbankan syariah yang digunakan oleh bank-bank yang menerapkan konsep syariah, dengan menguraikan bagaimana menjual sebuah produk berlabel syariah.
3. Buku "Bank Syariah: teori ke praktek oleh Muhammad Safi'i Antonio. Memaparkan teori dan implementasi perbankan syariah dan menegaskan tentang bagaimana perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dalam menjalankan seluruh kegiatan perbankan, mulai dari produk dan bagaimana seharusnya akad itu dijalankan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
4. Buku "Konsep & Implementasi Bank Syariah" oleh Muhammad Firdaus NH. Memaparkan teori dan implementasi perbankan syariah mulai sejarah perkembangan hingga sistem pengelolaan dana yang dipakai pada bank-bank

syariah dulu dan sekarang yang merupakan *Briefcase Book* edukasi profesional syariah.

5. Tesis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudārabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep oleh Try Subakti, S.Sy. Menegaskan bahwa pelaksanaannya menggunakan akad payung. Akad Payung yang dimaksud adalah adanya dua akad dalam satu transaksi di mana antara bank ke deposan menggunakan akad *mudārabah* dan ketika menyalurkan dana menggunakan akad *murābahah* sedangkan pihak bank hanya menjadi pihak ke tiga yang berfungsi sebagai perantara dana antara deposan dan pengelola dana.
6. Tesis, “Implementasi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah oleh Nurul Hidayati. Penelitian ini menguraikan bagaimana proses pembiayaan yang menggunakan jaminan sebagai bentuk kehati hatian perusahaan jika sewaktu waktu nasabah melakukan wanprestasi dengan tidak menjalankan kewajibannya terhadap perusahaan sebagaimana yang telah tertuang pada akad. Tetapi Tesis ini hanya mengenai permasalahan hak tanggungan dan tidak menguraikan secara umum apakah pelaksanaan pembiayaan yang dijalankan perbankan tersebut telah sesuai dengan konsop perbankan yang ditawarkan oleh konsep ekonomi yang dibangun di atas prinsip syariah.
7. Tesis, “Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan *Murābahah* (Studi Bank Muamalat Kota Parepare)”. Penelitian ini menguraikan bagaimana bentuk akad dan standar operasional produk pembiayaan *murābahah* dan bagaimana penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan *murābahah* pada Bank Muamalat kota Pare-pare. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rio Makkulau, bahwasanya, bentuk akad dan standar operasional produk pembiayaan *murābahah* pada bank Muamalat kota Parepare dengan mengacu

kepada ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah, BI (Bank Indonesia), OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Fatwa DSN-MUI masih ada beberapa yang perlu diperhatikan yakni pada prinsip transparansi dan keterbukaan agar terhindar dari *assymetric information* dalam transaksi *murābahah* adapun pada penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan *murābahah* pada bank Muamalat kota Pare-pare telah sesuai dengan Undang-undang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN-MUI, yang seharusnya pihak bank harus mengedepankan prinsip transparansi dalam setiap akad yang dilakukan.

8. Jurnal “Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Perbankan (Bank Syariah VS Bank Konvensional)” oleh Dr. Harif Amali, SE., M.Si. Menegaskan dalam penelitiannya bahwa mayoritas dari masyarakat tidak setuju dengan prinsip bunga akan tetapi mereka tetap memilih dan setuju dengan lembaga perbankan yang sesuai dengan pandangan ekonominya.

Jika penelitian tersebut dihubungkan dengan judul tesis ini, maka terdapat persamaan yakni sama-sama membahas mengenai perbankan syariah namun berbeda mengenai objek yang diteliti Bahkan secara khusus sangat berbeda pada lokasi penelitiannya.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mengenal produk perbankan syariah yang ada pada Bank BNI Syariah cabang pangkep dan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaannya secara mendalam.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana bank BNI Syariah mengimplementasikan nilai-nilai hukum ekonomi Islam pada produk-produknya.

- c. Untuk mengetahui bagaimana respon nasabah bank BNI Syariah cabang Pangkep terhadap nilai-nilai hukum ekonomi Islam yang diterapkan pada produk-produknya.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Agar masyarakat umum lebih bijak mengambil keputusan dalam menentukan pilihan produk-produk perbankan syariah yang dapat memberikan manfaat yang lebih banyak kepada mereka.
- b. Agar Bank BNI Syariah lebih meningkatkan mutu dan menonjolkan nilai-nilai ekonomi Islam di setiap produknya sekaligus membantu masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk mulai perlahan-lahan berhijrah dan meninggalkan dunia perbankan yang menerapkan sistem riba.
- c. Agar bank BNI Syariah lebih memahami kebutuhan para nasabah serta dapat meningkatkan kualitas kerja para pegawainya sehingga kedepannya Nilai-nilai Hukum Ekonomi Islam tersebut dapat diimplementasikan secara maksimal.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tinjauan Umum tentang Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Syariah dan Tujuannya

Apabila merumuskan pengertian ekonomi syariah dalam versi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan dan/atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksadana syariah,
- f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
- k. Bisnis syariah.

Pengertian ekonomi syariah di atas, dapat dipahami dan dirumuskan beberapa tujuan sistem ekonomi syariah di antaranya:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran QS al-Baqārah/2 ayat 2 dan 168, al-Māidah/5 ayat 87-88, al-Jumu'ah/62 ayat 10),
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (QS al-Hujurāt/49 ayat 13, al-Māidah/5 ayat 8, al-Syu'arā'/26 ayat 183);

- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS al-An'ām/6 ayat 165, al-Nahl/8 ayat 71, al-Zukhruf ayat 32);
- d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS al-Ra'd/13 ayat 36, Luqmān/31 ayat 22).

Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'rūf nahyi munkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Hal dimaksud ekonomi syariah dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang sebagai berikut.

- a. Ekonomi Ilahiyah (Ke-Tuhan-an)

Ekonomi Ke-Tuhan-an mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (Syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridha Allah.

- b. Ekonomi Akhlak

Ekonomi akhlak mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlak harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa mempedulikan orang lain.

- c. Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberikan predikat "*Khalīfah*" hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui perannya sebagai "*Khalīfah*" manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi. '

- d. Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan

akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun penganut ajaran Islam sendiri seringkali tidak menyadari hal dimaksud. Hal itu terjadi karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis, karena berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat, dan juga bahwa pandangan dari Barat selalu dianggap lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia Barat sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasiskan Syariah.

2. Pengertian dan Tujuan Ekonomi Islam

Selain pengertian ekonomi syariah dalam versi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tidak ada salahnya bila mengemukakan pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan antara lain: (a) konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia; (b) alat pemenuh kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam; (c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan; (d) pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan

merupakan sarana yang ampuh.¹ Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba (*profit*), namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan kalau batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan saksama akan merupakan suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.² Oleh karena itu, ditemukan tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-Nya (QS Taha/20 ayat 6 dan QS al-Mā'idah/5 ayat 120). Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya.
- b. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain terutama flora dan fauna diciptakan Allah untuk manusia, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya (QS Luqmān/31 ayat 20, QS al-Nahl/8 ayat 10-16, QS Fātir/35 ayat 27-28, QS al-Zumar/39 ayat 21).
- c. Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah. Pertanggung jawaban itu tidak hanya mengenai tingkah

¹Halide Maja Ali, *Mimbar Ummi* (t.t: t.p, 1982), h. 15.

²Syafruddin Prawiranegara, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Publicita, t.th). h. 10-15.

laku ekonominya saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang diamanatkan Allah kepada manusia.³

Ketiga asas pokok filsafat hukum ekonomi Islam tersebut melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi Islam, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Pemilikan menurut sistem hukum ekonomi Islam: (a) Pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya; (b) Lama pemilikan atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia hidup di dunia ini dan kalau ia meninggal dunia, harta kekayaannya harus dibagikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan yang ditetapkan Allah (QS al-Nisā/4 ayat 7, 11, 12, 176); (c) Sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum atau orang banyak.
- 2) Keseimbangan nilai dasar harus dijaga sebaik-baiknya, bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Di samping itu, harus dipelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 3) Keadilan, kata adil dalam al-Quran disebut lebih dari 1.000 kali setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Ini berarti prinsip keadilan diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi, karena keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.⁴

³A.M. Saefuddin, *Studi Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 1984), h. 19.

⁴H. Moh. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 214.

Ketiga nilai-nilai dasar sistem hukum ekonomi Islam tersebut merupakan pangkal (asal) nilai-nilai instrumentalnya. Nilai instrumental dimaksud ada lima, yaitu a) zakat, b) pelarangan riba dan judi, c) kerja sama ekonomi, d) jaminan sosial, dan e) peranan negara. Kelima hal dimaksud, diuraikan sebagai berikut.

a) Zakat

Zakat mempunyai fungsi yang penting dalam sistem ekonomi sehingga di dalam al-Quran disebutkan sebanyak 82 ayat setelah perintah shalat, sehingga zakat merupakan satu-satunya rukun Islam yang diwajibkan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Karena itu keduanya harus dibedakan. Zakat sebagai sumber dana masyarakat Islam, besar sekali manfaatnya apabila dikelola dengan manajemen yang baik dan dilaksanakan bersama dengan nilai instrumen lainnya, yaitu pelarangan riba.

b) Pelarangan riba dan judi

Riba dan judi mempunyai dampak negatif dalam kehidupan sosial ekonomi dan sosial kemasyarakatan lainnya sehingga Allah swt. melarangnya. Pelarangan riba dan judi dapat dilihat pada QS al-Baqārah/2 ayat 275, 276, 278, disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai pelarangan riba dan judi. Riba menurut sebagian ulama yang relevan dengan ekonomi ada dua, yaitu riba nasi'ah dan riba fadhal. Riba nasi'ah adalah tambahan pada utang-piutang berjangka waktu sebagai imbalan jangka waktu tersebut. Riba nasi'ah ini dilarang karena mengandung unsur-unsur eksploitasi, pemerasan, sedang unsur tolong-menolong yang dianjurkan dalam ajaran Islam hilang sama sekali. Adapun riba fadhal adalah tambahan yang diperoleh seseorang sebagai pertukaran dua barang yang sejenis. Riba fadhal ini juga dilarang karena bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Qardhawi bahwa riba merupakan AIDS dalam kehidupan dunia ekonomi yang

dapat merontokkan kekebalan (*immunity*), dan mengancamnya kepada kemusnahan serta keruntuhan.⁵

c) Kerja sama ekonomi

Kerja sama dalam mewujudkan sistem hukum ekonomi Islam bersumber dari ajaran Islam di antaranya dapat disebut *qirāḍ*. *Qirāḍ* adalah kerja sama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha yang mempunyai keahlian, keterampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau usaha. Dalam praktiknya *qirāḍ* dibagi dua, yaitu *muḍārabah* dan *murābahah*.

d) Jaminan sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu nilai instrumental yang sangat penting dalam sistem hukum ekonomi Islam. Karena itu, melaksanakan jaminan sosial, manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan harta mereka bersih dan berkembang, menghilangkan sifat tamak dan loba serta mementingkan diri sendiri.

e) Peran negara

Peranan negara pada umumnya dan pemerintah khususnya, sangat menentukan dalam nilai-nilai sistem hukum ekonomi Islam. Peranan tersebut diperlukan dalam aspek hukum, perencanaan, dan pengawasan alokasi atau distribusi sumber daya dan dana, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.⁶

Berdasarkan pengertian ekonomi syariah dan ekonomi Islam yang telah diuraikan maka tampak bahwa apa yang menjadi objek pembahasan ekonomi syariah maka hal itu juga yang menjadi objek ekonomi Islam. Demikian juga objek

⁵Yusuf Qardhawi, *Bank Tanpa Bunga* (Jakarta: Usamah Press, 1990), h. 35.

⁶A.M. Saefuddin, *Studi Sistem Ekonomi Islam*, h. 105.

pembahasan fikih *mu'amalah* di zaman kemajuan peradaban dan atau perekonomian umat Islam.⁷

Adapun secara historis, istilah Ekonomi Syariah digunakan oleh para pejuang Ekonomi Islam era 1990-an dahulu untuk menghaluskan dan menyamarkan makna dan ajaran Islam dalam ekonomi yang tengah diperjuangkan tersebut. Maklum, ketika itu aroma Islamophobia (anti Islam) masih amat kuat di sekitar pemerintahan Soeharto. Maka untuk memuluskan perjuangan Islam di lapangan ekonomi tanah air, AM. Saefuddin, M. Amin Aziz, Karnaen A. Perwataatmadja, dkk, sepakat menggunakan istilah Ekonomi Syariah untuk membuat kesan bahwa konsep ekonomi ini tidak hanya untuk umat Islam saja. Hal yang sama juga terjadi pada bank Islam yang diistilahi bank syariah. Bahkan agar tidak terkesan 'menakutkan' bagi kalangan sekuler dan anti-Islam bank Islam pertama di Indonesia disepakati bernama Bank Muamalat menggunakan istilah *mu'amalah* yang bermakna umum.⁸

3. Prinsip-Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah

a. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut.⁹

1) Siap Menerima Risiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 7.

⁸Anto Apriyanto, *Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah* (LinkedIn: SlideShare, t.th), h.5-6.

⁹Hendri Tanjung, *Pilar-pilar Ekonomi Islam dalam Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah*, h.

menerima risiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "di mana ada manfaat, di situ ada risiko" (*al kharaj bi al-damān*).

2) Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, Hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki oleh seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual-beli (*selling and buying*) secara kontinu. Suatu koin terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi muka dan sisi belakang. Tanpa sisi muka, suatu benda tidak dapat dikatakan koin. Sisi muka dan sisi belakang, secara bersama-sama membentuk apa yang disebut koin. Begitu juga dalam kegiatan ekonomi, Saud mengatakan bahwa koin ekonomi terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi jual (*selling*) dan sisi beli (*buying*). Uang itu harus secara kontinu mengalir dalam ekonomi, bukan berhenti di satu simpul. Untuk itu, penulis menawarkan 3 (tiga) cara untuk menggunakan uang yang diperbolehkan secara syariah, yaitu (a) konsumsi yang halal, (b) kegiatan produktif/investasi, dan (c) kesejahteraan sosial.

3) Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada

kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiq al-Khairāt*. *Depreciation*, segala sesuatu di dunia ini mengalami depresiasi. Kekayaan juga terdepresiasi dengan zakat. Yang abadi di dunia ini hanya satu, yaitu Allah swt. Karena itu *Money is a just a means of exchange*. Uang bukan merupakan alat penyimpan nilai. Uang bukan merupakan komoditi. Komoditi mempunyai harga, tetapi uang tidak. Pisang misalnya mempunyai harga. Begitu juga dengan komoditi lain seperti komputer, furniture, dan lain-lain. Islam tidak memperbolehkan menetapkan harga pada uang. Jika seseorang memberi pinjaman 5 juta rupiah kepada orang lain maka orang yang menerima pinjaman itu mengembalikan 5 juta rupiah dan bukan 5,2 juta atau 5,4 juta rupiah. Uang hanyalah sebagai perantara (alat tukar). Hal itu berarti uang sebagai alat tukar, bermakna nilainya harus dijaga agar tetap stabil.

4) Pelarangan Interes Riba

Ada orang berpendapat bahwa al-Quran hanya melarang riba dalam bentuk bunga berbunga (*compound interest*) dan bunga yang dipraktikkan oleh bank konvensional (*simple interest*) bukan riba. Namun, jumhur ulama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Beberapa orang juga berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada kegiatan perdagangan seperti yang dipraktikkan pada zaman jahiliah, bukan pada kegiatan produksi seperti yang dipraktikkan oleh bank konvensional saat ini. Namun, Zainuddin Ali tetap berpendapat dalam bukunya Hukum Ekonomi Syariah bahwa seluruh jenis *interest* adalah riba termasuk bunga bank dan diharamkan (dilarang) oleh Allah swt.¹⁰ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Baqārah/2: 278.

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut), jika kamu benar-benar orang yang beriman.¹¹

Selain itu, penulis mengemukakan dalil hukum tentang pelarangan riba yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنَّبُوا سَبْعَ مَوْبِقَاتٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُنَّ قَالَ شِرْكُ اللَّهِ سِحْرُ قَتْلُ نَفْسٍ تَبَى حَرَمُ اللَّهِ لَا بِلَا حَقٍّ أَكْلُ مَالِ يَتِيمٍ أَكْلُ رِبَا تَوَيُّ يَوْمٍ زَحْفٍ قَدْ مُحْصَنَاتٍ غَافِلَاتٍ مَوْنَاتٍ¹²

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. katanya: Rasulullah telah bersabda: Jauhilah tujuh perkara yang bisa membinasakan kamu yaitu menyebabkan kamu masuk neraka atau dilaknati oleh Allah. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah tujuh perkara itu? Rasulullah bersabda: Mensyirikkan Allah yaitu menyekutukan-Nya, melakukan perbuatan sihir, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan pertempuran dan memfitnah perempuan-perempuan yang baik yaitu yang boleh dikawini serta menjaga muruah dirinya, juga perempuan yang tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan jahat serta perempuan yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya dengan fitnah melakukan perbuatan zina.

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي هَاتِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ تَمَرٍ بِتَمَرٍ قَالَ كَلَّ رَبَا مَرْبَنَةً لَا تَهْ خَصَّ فِي بَيْعِ عَرِيَّةٍ نَخْلَةٍ نَخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلٌ بَيْتٍ بِخَرْصِهَا تَمَرٍ يَأْكُلُونَهَا طَبَا¹³

Artinya:

Diriwayatkan dari Sahl bin Abi Hatsamah ra. katanya: Sesungguhnya Rasulullah saw. telah melarang penjualan kurma dibayar dengan kurma, baginda bersabda: Itu adalah riba, yaitu Muzabanah, jual beli yang tidak jelas. Baginda hanya memberi keringanan dalam penjualan secara Ariyyah yaitu satu atau dua pokok

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48

¹²Husain Muslim Ibn al-hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Shahih Muslim*, h. 5.

¹³Husain Muslim Ibn al-hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Shahih Muslim*, h. 13.

kurma diambil oleh satu keluarga dengan kiraan kurma kering dan mereka makan buah yang separuh masak.

حَدَّثَنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا نَزَلَتْ لَأَيَّاتٍ نَّ خَرِ سُورَةُ بَقَرَةَ خَرَجَ
سُورَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَرَاهُنَّ عَلَيْنَا ثُمَّ نَهَى عَنْ تَجَلَّةٍ فِي خَمْرِ¹⁴

Artinya:

Diriwayatkan dari Aisyah ra. katanya: Ketika ayat al-Quran yang terakhir dari Surah al-Baqarah tentang riba diturunkan, Rasulullah saw. keluar ke masjid lalu mengharamkan perdagangan arak.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَطَّابٍ أَنَّ سُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ يَا ذَهَبَ
بَا إِلَّا هَاءَ هَاءَ شَعِيرٍ بِا شَعِيرٍ بَا إِلَّا هَاءَ هَاءَ تَمْرٌ بِا تَمْرٌ بَا إِلَّا هَاءَ هَاءَ¹⁵

Artinya:

Diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab ra. katanya: Bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: Perak ditukar dengan emas adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu yang sama. Gandum ditukar dengan gandum adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu tersebut. Kurma ditukar dengan kurma juga adalah riba kecuali diserahkan dan diterima pada waktu yang sama.

5) Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial seorang muslim terhadap sesamanya dapat diibaratkan dalam satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problem kemiskinan, maka tugas kaum muslimin lainnya untuk menolong orang miskin itu (dengan cara membayar zakat, infak, dan shadaqah). Kekayaan adalah milik Allah. Apa pun harta yang telah Allah berikan pada manusia, merupakan amanah dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkannya untuk menolong sesamanya. Hal itu merupakan jiwa dari pelaksanaan zakat sehingga ditujukan untuk menanggulangi masalah sosial kaum muslimin. Siapa pun yang menggunakan hartanya pada jalan Allah, akan

¹⁴Husain Muslim Ibn al-hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Shahih Muslim*, h. 40.

¹⁵Husain Muslim Ibn al-hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Shahih Muslim*, h. 43.

mendapatkan kompensasi di akhirat sebagaimana firman Allah dalam QS al-Muzzammil/73: 20 :

وَمَا تَقْدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۖ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Apa pun yang kamu berikan untuk diri kamu kebaikan, akan kamu dapatkan di sisi Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih besar.¹⁶

b. Manfaat Ekonomi Syariah

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri berupa: (a) mewujudkan integritas seorang muslim yang *kāffah*, sehingga “Islamnya tidak lagi parsial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba, berarti keislamannya belum *kāffah*, sebab ajaran ekonomi syariah diabaikannya; (b) menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan/atau Baitul Maal wat Tamwil (selanjutnya disebut BMT), mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Keuntungan dunia berupa keuntungan bagi hasil dan keuntungan akhirat adalah terbebasnya dari unsur riba yang diharamkan. Selain itu, seorang muslim yang mengamalkan ekonomi syariah, mendapatkan pahala, karena telah mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan aktivitas riba; (c) praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah swt; (d) mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah dan/atau BMT, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam itu sendiri; (e) mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 576.

Islam itu sendiri, sebab dana yang terkumpul di lembaga keuangan syariah itu dapat digunakan oleh umat Islam itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha kaum muslimin; (f) mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan *amar ma'rūf nahi munkar* sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau proyek-proyek halal. Bank syariah tidak akan mau membiayai usaha-usaha haram, seperti pabrik minuman keras, usaha perjudian, usaha narkoba, hotel yang digunakan untuk kemaksiatan atau tempat hiburan yang bernuansa munkar, seperti diskotek, dan sebagainya.

4. Ekonomi Syariah Dilihat Dari Aspek Fikih Muamalah

Fiqh mu'āmalah (selanjutnya digunakan bahasa Indonesianya, yaitu fikih) terdiri atas dua kata, yaitu kata *Fiqh* dan kata *mu'āmalah*. Kata *fiqh* secara etimologi berarti paham, pengertian, dan pengetahuan. *Fiqh* secara terminologi adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis (*'amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁷

Kata *Mu'āmalah*, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

Kalau kata *fikih* dihubungkan dengan perkataan *mu'āmalah* sehingga menjadi *fikih mu'āmalah* adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*'amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang,

¹⁷Agustianto, (Sekjend Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Dosen Fikih Muamalah) dalam Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 118.

penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.¹⁸

a. Pengertian *Fikih Mu'āmalah*

Pengertian *fikih mu'āmalah* pada mulanya seperti yang telah diuraikan sebelumnya, memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun, belakangan ini pengertian fikih muamalah lebih banyak dipahami sebagai "aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda" atau lebih tepatnya "aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia".

b. Ruang Lingkup *Mu'āmalah*

Ruang Lingkup Muamalah mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia sebagai berikut.

1. Harta, Hak Milik, Fungsi Uang dan 'Uqūd (akad-akad)
2. *Buyū'* (tentang jual beli)
3. *Al-Rahn* (tentang pegadaian)
4. *Hiwālah* (pengalihan utang)
5. *Al-Ṣulhu* (perdamaian bisnis)
6. *Al-Daman* (jaminan, asuransi)
7. *Syirkah* (tentang perkongsian)
8. *Wakālah* (tentang perwakilan)
9. *Wadi'ah* (tentang penitipan)
10. *Ariyah* (tentang meminjam)
11. *Ghasab* (perampasan harta orang lain dengan tidak sah)
12. *Syuf'ah* (hak diutamakan dalam *syirkah* atau sepadan tanah)

¹⁸Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 119.

13. *Muḍārabah* (*syirkah* modal dan tenaga)
14. *Musāqat* (*syirkah* dalam pengairan kebun)
15. *Muzāra'ah* (kerja sama pertanian)
16. *Kafālah* (penjaminan)
17. *Taflīs* (jatuh bangkrut)
18. *Al-Hajru* (batasan bertindak)
19. *Ji'ālah* (sayembara, pemberian fee)
20. *Qarḍ* (pinjaman)
21. *Bai' Muḍārabah*
22. *Bai' Salām*
23. *Bai' Istishna'*
24. *Bai' Muajjal* dan *Ba'i Taqsīt*
25. *Bai' Sharf* dan transaksi valas
26. *'Urbun* (panjar/DP)
27. *Ijārah* (sewa-menyewa)
28. Riba, konsep uang dan kebijakan moneter
29. *Ṣukūk* (surat utang atau obligasi) dd. Faraidh (warisan)
30. *Luqāṭah* (barang tercecceh)
31. Waqaf & Hibah
32. Wasiat
33. *Iqrār* (pengakuan)
34. *Qismul fa 'i wal ghanimah* (pembagian *fa 'i* dan *ghanimah*)
35. *Qism al-Ṣadaqah* (tentang pembagian zakat)
36. *Ibrāk* (pembebasan utang)
37. *Muqāsah* (Discount)
38. *Kharaj, Jizyah, Ḍaribah, Ushur*

39. *Baitul Māl* dan *Jihbiz* '

40. Kebijakan flskal Islam

41. Prinsip dan perilaku konsumen

42. Prinsip dan perilaku produsen

43. Keadilan distribusi

44. Perburuhan (hubungan buruh dan majikan, upah buruh)

45. Jual beli *gharar*, *bai' najasy*, *bai' al-'inah*, *bai wafā'*, *mu'athah*, *fuḍuli*, dan lain-lain.

46. *Ihtikār* dan monopoli

47. Pasar modal Islami dan Reksadana

48. Asuransi Islam, Bank Islam, Pegadaian, MLM, dan lain-lain

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtiṣādiyyah* (ekonomi Islam). Kitab-kitab fikih Islam tentang muamalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fikih mereka dan dalam halaqah (pengajian-pengajian) keislaman mereka. Seluruh Kitab Fiqh membahas fiqh ekonomi. Bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas ekonomi Islam, seperti kitab *Al-Amwāl* oleh Abu Ubaid, Kitab *Al-Kharaj* karangan Abu Yusuf, *Al-Iktisāb fī Rizqi Al-Mustathāb* oleh Hasan Asy-Syaibani, *Al-Hisbah* oleh Ibnu Taymiyah, dan banyak lagi yang tersebar di buku-buku Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, Al-Ghazali, dan sebagainya. Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan kaum muslimin, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya, terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-

sepotong). Padahal orang-orang beriman diperintahkan untuk memasuki Islam secara *kāffah* (menyeluruh) sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqārah/2: 208:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh (*kāffah*). Jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.¹⁹

Akibat dari terlupakan dalam pengkajian di bidang ekonomi maka umat Islam tertinggal dalam ekonomi dan banyak kaum muslimin yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidupnya, seperti *riba*, *maisir*; *garar*, haram, *batil*, dan sebagainya.

Ajaran muamalah adalah bagian paling penting (*daruriyat*) dalam ajaran Islam. Dalam kitab *al- Mu 'āmalah fī al-Islām*, Abdul Sattar Fathullah Sa'id mengatakan:

نَ ضَرُورِيَّةٌ هَذِهِ لِاجْتِمَاعِ لِنَاسٍ جُحُودٌ مُعَالَاةٌ مَا بَيْنَ أَفْرَادِهِ جَمَاعَتِهِ ذَٰلِكَ جَاءَتْ شَرِيعَةٌ لَا هِيَ تَنْظِيمُ هَذِهِ مُعَالَاةٌ لَا تَحْقِيقُ قُصُورُهَا فَصُلُ بَيْنَهُمْ²⁰

Artinya:

Di antara unsur *darurah* (masalah paling penting) dalam masyarakat manusia adalah 'Muamalah ', yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Karena itu syariah ilahiyah datang untuk mengatur muamalah di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariah dan menjelaskan hukumnya kepada mereka. Menurut ulama Abdul Sattar di atas, para ulama sepakat tentang mutlakanya umat Islam memahami dan mengetahui hukum muamalah maliyah (ekonomi syariah).

قَدْ تَفَقَّحَ عُلَمَاءُ أَنَّ عَلَى مُعَالَاةِ نَفْسِهَا ضَرُورِيَّةٌ بَشَرِيَّةٌ²¹

¹⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 33.

²⁰Abdul Sattar Fathullah Sa'id, *Al-Mu 'amalah fil Islam* dalam Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 121.

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 122.

Artinya:

Ulama sepakat bahwa muamalat itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang maha penting (dharuriyah hasyariyah).

5. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam

Pembangunan perekonomian masyarakat dalam kerangka Islam menekankan pada proses yang dilakukannya. Artinya, proses pembangunan perekonomian akan mencapai tujuan apabila cara-cara yang dilakukan tersebut adalah benar, yaitu sesuai dengan syara' atau hukum Islam. Begitu juga sebaliknya, tujuan tidak tercapai apabila dilakukan dengan cara-cara yang salah. Cara-cara yang salah adalah cara tidak sesuai dengan syara'.

Nilai-nilai hukum ekonomi Islam antara lain:

a. *Amar ma'rūf nahyi munkar*

Al-Quran menggunakan istilah *ma'rūf* untuk kebajikan dan *munkar* untuk kebatilan. *Ma'rūf* adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia bahwa hal itu disenangi oleh Tuhan, baik itu perkara wajib atau sunnah, yang mengandung kemaslahatan untuk individu dan jama'ah, di dalamnya mengandung kebaikan dan manfaat bagi individu dan masyarakat. Adapun *munkar* adalah sesuatu yang diingkari oleh Tuhan, dilarang oleh Tuhan dan Rasul-Nya karena mengandung bahaya bagi individu dan masyarakat.²² Menurut Abul Kalam Azad, *ma'rūf* adalah apa yang disepakati semua pihak sedangkan *munkar* berarti hal yang tidak bisa disepakati oleh semua pihak. Al-Quran telah menggunakan istilah ini teristimewa karena apa pun perbedaan yang ada di kalangan umat manusia, ada hal-hal tertentu yang disepakati oleh semua pihak sebagai yang baik, dan demikian pula ada hal-hal tertentu yang disepakati semua pihak sebagai hal yang tidak baik. Misalnya, semua sepakat bahwa berkata jujur adalah betul

²²Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Ya Ayyuhallazina Amanu I (Nida Atirrahman Li Ahlil Iman)* penerjemah H. Abdurrahman Kasdi dan Hj. Umma Farida (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 530-531.

dan berkata tidak jujur adalah salah. Semua sepakat bahwa kejujuran itu merupakan kebajikan dan ketidakjujuran adalah kebatilan.²³

Ibnu Qudamah, mengatakan, "Ketahuilah bahwa *amar ma'rūf nahyi munkar* merupakan poros yang paling besar dalam agama dan merupakan tugas yang karenanya Allah mengutus para nabi. Andaikan tugas ini ditiadakan maka akan muncul kerusakan di mana-mana dan dunia pun akan binasa."²⁴ Allah berfirman dalam QS Ali Imran/3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang *ma'rūf* dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.²⁵

Di dalam ayat ini, ungkap Ibnu Qudamah, terkandung penjelasan bahwa tugas itu merupakan *farḍu kifayah* dan bukan *farḍu 'ain*. Sebab Allah swt. berfirman: "Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat", dan tidak difirmankan "jadilah setiap orang di antara kalian yang menyuruh kepada yang *ma'rūf*" Jika sudah ada yang melaksanakannya, berarti yang lain sudah terbebas dari tugas tersebut. Namun, ada keberuntungan yang khusus dan kabar gembira bagi orang-orang yang melaksanakannya."

Nabi Muhammad saw. bersabda:

تَلُّ قَوْلَ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَقَع فِيهَا كَمَثَلِ قَوْلٍ سَتَهُمُ عَلَى سَفِينَةٍ فَصَلَّ بَعْضُهُمْ
عَلَاهَا بَعْضُهُمْ سَفَلَهَا فَكَانَ ذَيْنَ فِي سَفَلَهَا سَتَقَوْا نَ مَاءٍ رَ عَلَى نَ فَوْقَهُمْ

²³Abdul Kalam Azad, *Renungan Surah Al-Fatihah; Konsep Ketuhanan dalam Al-Qur'an*, penerjemah Asep Himat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 228.

²⁴Ibnu Qudamah, *Minhaj Qāsidīn: Jalan Orang-orang yang Mendapat Petunjuk (Mukhtasar Minhaj-Qāsidīn)* penerjemah Katur Suhardi, Cet. 11 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 147.

²⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 63.

فَقَالُوا وَوَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبٍ خَرْقًا مَّا نُوْنُ فَوْقَنَا فَإِنْ تَرَكَوْهُمْ لَـٰهُمْ هَلْقُومًا
جَمِيعًا، إِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِمْ نَجَوْ نَجَوْ جَمِيعًا (سورة هـ: ٢٤)

Artinya:

Perumpamaan orang yang menegakkan ketentuan Allah dan orang yang merusaknya seperti suatu kaum yang berhimpun dalam satu kapal, sebagian ada di atas, sebagian di bawah. Orang yang di bawah kalau akan mengambil air harus melewati orang di atas, lalu berkata: kalau kita melubangi dinding bagian kita ini, tentu tidak perlu kita mengganggu orang yang di atas waktu mengambil air. Jika hal itu dibiarkan hancurlah seluruhnya. Namun jika tangan mereka ditahan, selamatlah seluruhnya. (HR. Al-Bukhari)

Hadis ini menerangkan keutamaan atas orang yang menegakkan ketentuan Allah, dan celaan atas orang yang meninggalkannya dan berdiam terhadap kemaksiatan yang ada. Dan merupakan celaan bagi orang yang meninggalkan mengajak berbuat *ma'rūf* dan mencegah kemungkaran.²⁶ Dengan adanya perintah al-Qur'an dan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah tentang menyeru yang *ma'rūf* dan mencegah yang mungkar, maka kehadiran Dewan Pengawas Syariah dan audit internal sangat diperlukan untuk mengawasi aktifitas lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah.

b. Ta'āwun

Ta'āwun adalah sikap saling membantu, menolong, dan meringankan beban dan kesulitan satu sama lain. Rasa cinta, kasih dan sayang sejatinya tidak diterapkan hanya kepada diri sendiri, melainkan juga kepada orang lain. Dalam Islam tidak ada diskriminasi dalam kebaikan. Oleh karenanya Ia harus dilakukan secara totalitas dan komprehensif. Muamalah yang dilakukan pun semata-mata untuk membangun kerja sama saling membatu satu sama lain.

c. Keadilan

Berkenaan dengan masalah keadilan ini, ada dua kata yang digunakan al-Quran, yaitu *al-adl* dan *al-qist*. Di mana *al-qist* juga bermakna *al-adl wa al-taswiyyah*

²⁶A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: AZMAH, 2010), h. 69.

atau *justice*.²⁷ Nas-nas al-Quran yang menyebutkan keadilan, bukan hanya sekadar anjuran, namun berbentuk perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Allah swt. berfirman dalam QS Al-Nahl/16: 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.²⁸

Alif dan lam dalam kata *al-adl* dan *al-ihsān* dalam ayat ini mengisyaratkan sesuatu yang umum dan menyeluruh, semua bentuk keadilan dan segala bentuk bentuk ke-*ihsān*-an sudah tercakup di dalamnya. Adil berarti persamaan dan penyadaran. Sedangkan *ihsān* adalah upaya mencari *maslahat* dan menghindari kerusakan. Begitu juga alif dan lam dalam kalimat *al-fahsyā' wa al-munkar wa al-bagyi*, secara umum menunjuk pada generalisasi segala macam kemungkaran dan kerusakan, baik secara lisan maupun tindakan. Khusus tentang perintah kepada keadilan sebagai prinsip dasar hukum di antara manusia, maka Allah swt. berfirman dalam QS Al-Nisā'/4: 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.²⁹

²⁷Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat Al-Fuqāha (dictionary of islamic legal terminology) Arabic-English*, Cet. 2 (Beirut: Dar al-nafae, 1998), h. 363.

²⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 227.

²⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 87.

Abdullah bin Zaid bin Aslam mendengar dari ayahnya bahwa kakeknya Aslam menuturkan, ketika kami sedang bersama Umar bin Khattab & berkeliling di tengah malam untuk memantau keadaan di kota Madinah, tiba-tiba ia bersandar pada tembok dan terdengarlah suara seorang perempuan mengatakan kepada putrinya: "Ambillah susu itu dan campurlah dengan air". Putrinya menjawab "Ibu, tidakkah engkau tahu bahwa Khalifah Umar bin Khattab hari ini telah bertekad untuk memberantas kecurangan?" Ibunya bertanya, "Apa tekadnya itu?" Ia menjawab, "Khalifah telah memerintahkan kepada seorang penyeru untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar tidak mencampur susu dengan air ". Ibunya tetap bersikeras agar putrinya mencampur susu dengan air sebelum dijual, dengan mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab tidak akan melihat dan penyerunya juga tidak. Ia menjawab lagi, "Ibu, pantaskah aku menaatinya di depan orang, sementara menentanginya dari belakang?"

Sementara Khalifah Umar bin Khattab beserta orang-orang yang bersamanya mendengar semua pembicaraan mereka, kemudian ia berkata, "Wahai Aslam panggillah Abdullah bin Zaid bin Aslam, berilah tanda di pintunya dan kenalilah tempat rumah itu." Mereka lalu meneruskan perjalanan keliling hingga pagi hari. Setelah itu Khalifah Umar bin Khattab memberi perintah kepada Abdullah bin Zaid bin Aslam agar ia mendatangi tempat tinggal perempuan itu untuk mencari tahu, siapa sebenarnya orang yang berbicara dan yang diajak bicara?

Abdullah bin Zaid bin Aslam kemudian mendatangi rumah itu dan ternyata penghuninya adalah seorang perempuan janda, tidak mempunyai suami dan perempuan satunya lagi adalah putrinya, juga belum bersuami. Ia menyampaikan keadaan keluarga ini kepada Khalifah Umar bin Khattab. Mendengar berita tentang keadaan mereka, Umar memanggil dan mengumpulkan anak-anaknya seraya berkata:

“Apakah di antara kalian ada yang mau aku nikahkan dengan seorang perempuan?”. Salah seorang putranya, Abdullah bin Umar berucap: “Aku sudah mempunyai seorang istri”. Anak satunya lagi menyahut: “Aku juga sudah mempunyai seorang istri”. Sedangkan anak satunya lagi, Ashim menjawab: “Ayah, aku yang belum mempunyai istri, maka nikahkanlah aku”. Kemudian Umar mengirim utusan kepada gadis tersebut, lalu menikahkan dengan putranya, Ashim. Pasangan ini kemudian dikaruniai seorang anak perempuan yang kelak melahirkan Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dikenal adil dan ahli ibadah.³⁰

Dialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang selalu bertujuan menerapkan keadilan ideal bagi masyarakatnya. Pada suatu kesempatan ia bertanya kepada Muhammad bin Ka'ab tentang makna keadilan, lalu dijawab, "Anda bertanya tentang perkara besar. Keadilan adalah menjadikan dirimu sebagai bapak bagi orang kecil, sebagai anak bagi orangtua, sebagai saudara bagi orang yang sebaya, termasuk kaum perempuan, dan berikanlah hukuman kepada manusia menurut kadar kesalahan mereka." Maka Umar bin Abdul Aziz pun berucap: "Sesungguhnya aku mendapatkan banyak dari para pemimpin sebelum diriku yang menipu manusia dengan kekuasaan dan kedudukannya, memprioritaskan hartanya terhadap pengikut, keluarga, kelompok dan orang-orang dekatnya. Setelah aku diangkat sebagai pemimpin, mereka datang kepadaku untuk hal itu sehingga aku tidak dapat melakukannya kecuali menolak orang yang kecil dari gangguan orang yang kuat, dan orang rendah dari ulah bangsawan."³¹

³⁰Hanni al-Haj, *1001 kisah teladan (Alfu Qiṣṣatin wa Qiṣṣatu min Qaṣaṣi Al-Sālihīn wa Al-Sālihāt wa Nawādir Al-Zāhidīn wa Al-Zāhidāt) tej. Mustholah Maufūr* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 438-439;

³¹Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan & Adat dalam Islam (Nizām Al-Daulah wa Al-Qadā' wa Al-Urf Al-Islām)* penerjemah H. Asmuni Solihin Zamakhsyari (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 885.

Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau kedua-duanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi bisnis, sebagaimana termaktub dalam firman Allah QS Al-Rahman/55: 9.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.³²

QS. Al-Isra'/17: 35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³³

d. Jauh dari unsur riba

Salah satu topik yang terus menjadi bahan diskusi fuqaha dari dahulu hingga masa kini ialah masalah riba. Larangan keras memakan riba, tegas dan jelas dikemukakan dalam al-Quran. Demikian juga dalam hadis Nabi saw. cukup banyak mengutarakannya dan mencela pelakunya, sehingga pada prinsipnya disepakati keharaman riba, namun masih terdapat perbedaan pendapat dalam perinciannya.

Pembahasan ini dikaitkan pula dengan masalah perbankan yang memungut dan memberikan bunga kepada nasabah sebagai gejala umum dalam sistem perekonomian modern masa kini. Dan apakah bunga yang dipungut dalam dunia perbankan itu, termasuk dalam katagori ribawi yang diharamkan itu, atau tidak? Hal-hal inilah yang akan diutarakan dalam pasal-pasal berikut ini:

³²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 531.

³³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

1) Pengertian Riba

Dari segi bahasa, riba itu berarti: tambahan atau kelebihan. Dari pemecahan kata itu, didapati kata "rabiyyah" dan "rabwah" artinya: bukit atau tanah tinggi. Adapun dari segi istilah, jika dicoba dikumpulkan keterangan para ahli dan riwayat perkembangan riba di zaman jahiliah antara lain sebagai berikut:³⁴

- a) Riba jahiliah, ialah; kelebihan harga barang akibat pembayaran lewat waktu tertentu. Jika batas waktu itu telah tiba, sedangkan utangnya belum lunas, ditambahnya utang itu dengan mengundurkan lagi pembayarannya. (Qatadah)
- b) Seseorang pada zaman jahiliyah berhutang kepada orang lain, lalu ia berkata: "Akan saya tambah sekian, jika kamu memberi tempo kepadaku. Maka diberinya tempo itu oleh orang yang mempunyai piutang. (Mujahid)
- c) Sudah sama dimaklumi bahwa riba jahiliyah itu semata-mata adalah pinjaman berjangka waktu, dengan kelebihan yang diisyaratkan. Maka kelebihan itu adalah ganti (imbalan) dari jangka waktu itu, maka dibatalkanlah ia oleh Allah swt. (Abu Bakar al-Jashshash)
- d) Riba nasi'ah (yang berjangka waktu). Pada zaman jahiliyah sistem ini lebih dikenal, yaitu seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan syarat bahwa ia akan memungut suatu jumlah tertentu setiap bulan, dan modalnya tetap utuh. Apabila jatuh tempo, dimintanyalah kembali modalnya. Jika tidak sanggup mengembalikan modal itu, ditambahnyalah jumlah haknya (modalnya) dan temponya. (Ibnu Hajar al-Makki).
- e) Sesungguhnya riba zaman jahiliyah itu ialah berlipat ganda dan berlipat umur. Apabila seseorang meminjamkan hartanya, maka kalau sudah cukup temponya, ia pun berkata kepada orang yang berhutang; "Engkau bayar atau engkau tambah".

³⁴Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang dalam Islam* (Bandung: CV DIPONEGORO, 1984), h. 171-174.

Kalau tidak ada sesuatu yang dapat dipakai untuk membayarnya, maka dipindahkannya kepada umur yang di atasnya. Misalnya berhutang unta yang berumur setahun, dipindahkan hutangnya kepada yang berumur dua tahun, dan seterusnya. Dan kalau berhutang mata uang, maka kalau tidak dibayar, ditinggalkan ke tahun berikutnya. Hutang seratus, tahun berikutnya menjadi dua ratus. Kalau tidak dibayar juga, maka digandakan lagi menjadi empat ratus dan seterusnya. (Ibnu Jarir)

Demikianlah beberapa riwayat dan keterangan yang dapat mengungkapkan bentuk dan sifat riba jahiliyah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut: Riba jahiliyah ialah pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh yang berhutang, lebih besar dari jumlah pinjamannya, sebagai imbalan daripada tenggang waktu, dan kelebihan itu dapat terus meningkat menjadi berlipat ganda apabila lewat waktu.

2) *Naş* Riba dalam al-Quran

Sebagai dasar utama untuk mengetahui persoalan riba ialah firman Allah dalam al-Quran, yang dengan ayat-ayat itu dapat diketahui kedudukan hukumnya. Nampaknya riba itu menyempai jual beli karena sama-sama mendatangkan kelebihan (keuntungan), namun bentuk dan sifatnya berlainan. Jual beli dihalalkan, tetapi riba diharamkan. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqārah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat): "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³⁵

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

Karena itulah diserukan kepada orang-orang yang beriman, agar memelihara diri jangan sampai memakan riba sebagaimana firman Allah dalam QS Āli Imrān/3: 130.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Terjemahnya:

Hai sekalian orang yang beriman: ”Janganlah kalian makan riba berlipat ganda, dan takutlah kalian kepada Allah supaya kalian berbahagia.³⁶

Selain dilarang memakan riba yang berlipat ganda menurut tradisi jahiliyah, demikian juga sisa-sisa riba hendaklah ditinggalkan bagi orang yang sungguh-sungguh beriman sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqārah/2: 278.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman! Takutlah kalian kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika memang kalian benar-benar beriman!³⁷

Orang yang tidak mau menghentikan perbuatan itu, diancam dengan pernyataan perang dari Allah dalam QS al-Baqārah/2: 279.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

Terjemahnya:

Tetapi jika kalian tidak berbuat (meninggalkan sisa-sisa riba), maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya”.³⁸

Pemakan riba yang telah sadar dan bertaubat, tetap memiliki hak menerima kembali modalnya sebanyak yang dipinjamkannya sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqārah/2: 279.

وَأَن تُبْتِئَ فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67.

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

³⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

Terjemahnya:

Dan jika kalian bertaubat, maka kalian boleh ambil modal-modal kalian. (Dengan demikian) kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.³⁹

Sistem riba yang dimotivasi oleh kerakusan dan egoisme, setelah datang Islam diganti dengan sistem baru yang disinari oleh jiwa kedermawanan dalam memberikan piutang (tanpa riba). Prinsip inilah yang perlu dibina dan ditegakkan dalam masyarakat Islam sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqārah/2: 280.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah ia tenggang waktu, sampai ia berkelapangan. Dan bahwasanya kalian bersedekah itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui.⁴⁰

Secara lahir, riba mendatangkan keuntungan besar tanpa kerja keras, namun pada hakekatnya laba yang diperoleh dari riba itu, tidak ada keberkahan sama sekali. Sebaliknya memberikan piutang tanpa riba sebagai penghayatan dari jiwa sadaqah, itulah yang akan mendatangkan keberkahan hidup dan usaha sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqārah/2: 276 dan QS al-Rūm/30: 39.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya:

Allah hapuskan (berkah) riba, dan Ia suburkan (berkah) sadaqah. Allah tidak suka kepada setiap orang yang pelupa budi dan pendosa.⁴¹

Dalam menafsirkan ayat ini, Hamka mengungkapkan bahwa riba mesti dikikis habis sebab berpangkal dari kejahatan dan egoisme. Ditegaskannya pula bahwa berkah daripada riba itu tidak ada.⁴²

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

⁴²Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juz III (Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1968), h. 76.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba yang kalian berikan supaya jadi tambahan pada harta-harta manusia, maka tidaklah dia menambah di sisi Allah. Akan tetapi zakat yang kalian keluarkan karena mengharap ridla Allah, maka mereka itu akan memperoleh (keuntungan) yang berlipat ganda.⁴³

Dalam pada itu diingatkan watak segolongan orang-orang Yahudi yang dzalim, pemakan riba dan pengambil harta orang lain secara *batil*, jangan sampai orang-orang Islam meniru-niru mereka sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nisā/4: 160-161.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Terjemahnya:

Maka dengan sebab kedhaliman dari orang-orang Yahudi, Kami haramkan kepada mereka beberapa barang yang baik yang pernah dihalalkan bagi mereka, dan dengan sebab mereka berpaling jauh dari jalan Allah, Dan dengan sebab mereka memakan riba, padahal mereka telah dilarang daripadanya, dan dengan sebab mereka memakan harta manusia dengan (cara) yang tidak betul. Kami sediakan bagi orang-orang kafir dari antara mereka itu, siksaan yang pedih.⁴⁴

3) Riba Nasi'ah

Menghimpun keterangan para ahli tafsir dan penjelasan para fuqaha, pada umumnya mereka memandang bahwa riba yang dimaksudkan dalam al-Quran itu adalah riba nasi'ah, yakni bentuk riba yang merajalela di zaman jahiliyah, berupa kelebihan pembayaran yang dimestikan kepada orang yang berhutang sebagai imbalan daripada tenggang waktu yang diberikan.

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 409.

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 104.

Riba yang terkenal pada ayat riba ialah "riba nasi'ah" yaitu riba bertempo. Riba inilah yang dilarang dalam ayat riba yang paling akhir turunnya. Bukan riba yang terkenal di kalangan fuqaha, yaitu jual beli barang yang sejenis dan salah satu dari kedua barang itu berlebih, karena hal semacam ini belum dikenal di zaman jahiliyah. Oleh karena itu Ibnu Abbas membantah haramnya masalah itu, beliau meriwayatkan dari Usamah bahwa tidak ada riba melainkan yang bertempo. Lantaran perkataan Ibnu Abbas itu, salah seorang shahabat Nabi yang bernama Abu Said al-Khudri bertanya: "Apakah engkau mendengarnya dari Nabi atau dari Kitab Allah?"

Adapun *naş* yang menjelaskan bahwa riba yang dimaksudkan dalam al-Quran itu ialah riba nasi'ah, ialah suatu hadis shahih sebagai berikut:

قَالَ أَبُو صَالِحٍ زِيَّاتٌ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ خُذِيَ يَقُولُ دَيْنًا بِأَدَيْنًا دَاهِمٌ بِدَاهِمٍ هَمْ قُلْتُ هُمْ قُلْتُ هُ فَإِنْ بَنَ عَابَا لَا يَقُولُ هُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ جَدُّهُ فِي كِتَابٍ لَهُ قَالَ كُلُّكَ لَا أَقُولُ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْ أَخْبَرَنِي أُسْلَمَةُ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَا إِلَّا فِي نَسِيئَةٍ⁴⁵

Artinya:

Berkata Abu Shalih az-Zayyad, saya mendengar Abu Said al-Khudri berkata: "Dinar dengan dinar dan dirham den dan dirham". Maka saya bertanya kepadanya: "Sesungguhnya Ibnu Abbas tidak mengatakan demikian". Maka berkata Abu Said: "Saya sudah bertanya kepadanya, kata saya: "Adakah engkau mendengarnya dari Nabi atau engkau menemukannya dalam Kitabullah?" Ibnu Abbas menjawab: "Semua itu saya tidak mengatakan, dan engkau adalah orang yang lebih tahu dengan Rasulullah daripada saya. Akan tetapi Usamah menceritakan kepada saya bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada riba melainkan bertempo". (Muttafaq 'alaih)

Ulama telah ijma' tentang keharaman riba nasi'ah yang bentuk dan sifatnya seperti yang berlaku di zaman jahiliyah. Menurut Imam Ahmad, keharamannya itu tidak perlu diragukan lagi, karena al-Quran dengan jelas mengharamkannya. Yang

⁴⁵Abi Abdurrahman Ahmad ibn Suaib ibn Ali Al syahir bi al Nasai, *Sunan al-Nasai* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1997), h. 699.

”Janganlah kalian jual emas dengan emas melainkan sama dengan sama, dan jangan kalian tambah sebagian atas sebagian; dan janganlah kalian jual perak dengan perak melainkan sama dengan sama, dan jangan kalian tambah sebagiannya atas sebagian, dan janganlah kalian jual yang nyata dengan yang ghaib. (Muttafaq alaih)

Ubadah bin Shamit memberitakn bahwa Rasulullah saw. bersabda:

⁴⁶Husain Muslim Ibn al-hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Shahih Muslim*, h. 42.

⁴⁶Husain Muslim Ibn al-hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Shahih Muslim*, h. 42.

ذَهَبٌ بِذَهَبٍ ۖ فَضَّةٌ بِفَضَّةٍ ۖ بَرٌّ بِابِرٍّ ۖ شَعِيرٌ بِشَعِيرٍ ۖ تَمْرٌ بِتَمْرٍ ۖ مِلْحٌ
بِمِلْحٍ ۖ ثَلَا بِمَثَلٍ ۖ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ۖ يَدٌ بِيَدٍ ۖ خَتَلَتْ هَذِهِ لِأَصْنَا ۖ فَبِيعُوا كَيْفَ نَتَمُّ ۖ
كَانَ يَدٌ بِيَدٍ⁴⁷

Artinya:

(Boleh jual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya dan dengan tunai. Tetapi apabila berlainan macamnya bolehlah kalian jual sekehendak kalian jika dia tunai. (H.R. Muslim)

Abu Hurairah memberitakan, bahwa Nabi saw. bersabda:

ذَهَبٌ بِذَهَبٍ ۖ زَنًا بِوزْنٍ ۖ ثَلَا بِمَثَلٍ ۖ فَضَّةٌ بِفَضَّةٍ ۖ زَنًا بِوزْنٍ ۖ ثَلَا بِمَثَلٍ ۖ فَمَنْ
زَالَ أَلَسَّ سَتْرًا ۖ فَهُوَ بَا ۖ (ۖ هـ سلم)⁴⁸

Artinya:

(Juallah) emas dengan emas sama timbangannya, sama bandingannya. Barangsiapa menambah atau minta tambahan, maka dia itu riba. (H.R. Muslim)

Dari Abi Bakar berkata:

نَهَى نَبِيٌّ عَنِ ۖ فَضَّةٍ بِفَضَّةٍ ۖ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ ۖ لَأَسْوَأَ بِسَوَاءٍ ۖ زَنًا أَنْ نَشْتَرِيَ
ذَهَبًا بِفَضَّةٍ ۖ كَيْفَ نُنَا ۖ فَضَّةً بِذَهَبٍ ۖ كَيْفَ نُنَا⁴⁹

Artinya:

Nabi saw. melarang membeli perak dengan perak. emas dengan emas, kecuali sama timbangannya. Beliau menyuruh kami membeli perak dengan emas sesuka kami, dan membeli emas dengan perak sesuka kami. (Muttafaq alaih)

Diriwayatkan oleh Abi Said yang berkata: "Kami pernah mendapat kurma campuran. Kami jual satu sha' dengan dua sha. Maka sabda Nabi saw.:

لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ۖ لَا هَمَيْنِ بِدِهَمٍ⁵⁰

Artinya:

Janganlah engkau jual dua sha' dengan satu sha' dan jangan (menjual) dua dirham dengan satu dirham. (H.R. Bukhari)

⁴⁷Husain Muslim Ibn al-hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Shahih Muslim*, h. 42.

⁴⁸Husain Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Shahih Muslim*, h. 42.

⁴⁹Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 107.

⁵⁰Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (t.t, Maktabah Salafiyah, 1980), h. 83.

Abi Said al-Khudri dan Abi Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. menugaskan seseorang di Khaibar. Ia datang kepada Nabi saw. dengan membawa kurma yang baik. Maka sabda Rasulullah saw.: "Apakah kurma Khaibar semuanya begini?" Jawabnya: "Demi Allah, ya Rasulullah, tidak. Kami tukar dua sha' dengan satu sha'. dan tiga sha' dengan dua sha' ". Maka sabda Rasulullah saw.: "Jangan engkau berbuat demikian, (tetapi) luallah kurma campuran itu dengan dirham, kemudian belikanlah dengan dirham-dirham itu kurma yang baik". Dan ia pun berkata demikian pada (benda-benda) yang ditimbang. Demikian menurut riwayat Bukhari dan Muslim.

Fudlalah bin 'Ubaid meriwayatkan: "Pada hari peperangan Khaibar saya beli kalung dengan harga dua belas dinar yang ada padanya emas dan manik, lalu saya pisahkan dia, maka terdapat padanya emas lebih daripada dua belas dinar. Saya beritahukan hal itu kepada Nabi saw. maka sabdanya:

لَا تَبَاغُ حَتَّى تُفَصَّلَ (ﷺ)⁵¹

Artinya:

Tidak boleh dijual sebelum dipisahkan. (H.R. Muslim)

Demikian antara lain hadis-hadis yang mengemukakan larangan berjual beli emas, perak, gandum, jawawut, kurma dan garam dengan jenisnya masing-masing, kecuali dengan ukuran yang sama dan tunai.

5) Pandangan Fuqaha tentang Riba Fadhal

Sekelompok fuqaha berpegang kepada zhahir hadis tersebut, bahwa barang ribawi itu terbatas pada enam jenis yang tersebut dalam hadis itu saja, yaitu: gandum, jawawut, emas, perak, kurma dan garam. Adapun barang-barang lainnya tidaklah berlaku riba padanya, dan boleh dipertukarkan dengan terperinci tanpa syarat. Yang memegang pendapat ini ialah Qatadah, Thawus, Usman al-Batti, Ibnu Aqil al-

⁵¹Husain Muslim Ibn al-hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Shahih Muslim* (t.t: t.p, t.th), h. 46.

Hambali dan golongan Zhahiriah. Sedangkan kelompok yang terdiri dari Ammar, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, dalam suatu riwayat, memandang bahwa segala sesuatu yang dijual dengan memakai takaran atau timbangan dapat dimasuki riba.

As-Syafi'i dan Ahmad dalam suatu riwayat berpendapat bahwa riba itu memasuki emas, perak dan tiap-tiap makanan dan minuman yang dijual dengan memakai takaran dan timbangan.

Mazhab Maliki memandang keharaman riba fadhal itu atas makanan yang merupakan makanan pokok, dan yang dimaksud dengan makanan pokok ialah, makanan yang biasanya menguatkan tubuh.

Syekh Muhammad Abduh berkesimpulan bahwa haramnya riba fadhal tidak disepakati ulama, sebab apabila ia termasuk riba yang sudah dinash oleh al-Quran dan tidak diragukan lagi keharamannya, tentulah tidak akan timbul perselisihan. Sedangkan shahabat dan fuqaha dalam masalah ini telah berselisih pendapat. Menurut Muhammad Abduh, diharamkannya riba fadhal itu hanya untuk menutup pintu ke arah riba nasi'ah, bukan karena keadaannya itu sendiri. Dan sesuatu yang diharamkan hanya untuk menutup pintu itu, diperbolehkan melakukannya untuk kemashlahatan. Beliau menunjuk shahabat dan tabi'in yang memperbolehkan riba fadhal dengan mutlak, yaitu: Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Usamah bin Zaid, Ibnu Zubair, Zaid bin Arqam. Demikian juga shahabat-shahabat: Said bin Musayyab dan Urwah bin Zubair, lantaran berpegang kepada Hadis:

Sesungguhnya riba itu pada yang bertempo.

Ibnul Qayyim membagi riba menjadi dua: riba jaly dan riba khafy. Yang dimaksud dengan "riba jaly" ialah riba nasi'ah, dan yang dimaksud dengan "riba khafy" ialah riba fadhal. Kata beliau, bahwa riba jaly itu diharamkan karena mengandung bahaya besar. Dan riba khafy diharamkan karena merupakan sebab atau peran tara kepada riba jaly.

Ibnul Qayyim memandang bahwa riba fadhal itu diperbolehkan pada apa-apa yang diperlukan oleh manusia, seperti jual beli *'ariyah*, yaitu membeli buah kurma yang masih di pohon dengan jalan mengira-ngirakan jumlah dengan buah kurma pula. Jual beli pakaian itu boleh, meskipun harganya tidak sama dengan harga barang yang dibeli, karena upah tukang juga termasuk di dalamnya. Riba fadhal itu diharamkan hanya untuk menutup pintu kejahatan, akan tetapi apabila ada mashlahat yang lebih besar daripada mudlarnya, diperbolehkan. Ibarat seorang laki-laki, ia haram melihat perempuan yang tidak halal baginya, tapi apabila ada maksud yang lebih baik, seperti untuk meminang, untuk persaksian, untuk mengobati dan sebagainya, semuanya menghilangkan keharamannya.

A. Hasan dalam memberikan komentarnya dalam tarjamah Bulughul Maram, mengenai hadis-hadis riba fadhal, menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut bertentangan dengan sejumlah hadis-hadis lain. Menurut hadis-hadis itu (yang berkenaan dengan riba fadhal), tidak boleh kita pinjam uang emas atau perak, tidak boleh pinjam gandum atau garam, karena pinjam itu artinya tidak tunai. Sedangkan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah, bahwa Nabi saw. membolehkan orang-orang memberi uang lebih dahulu buat beli buah-buah, yang termasuk di dalamnya tamar, untuk tahun depan atau tahun berikutnya. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Ahmad bahwa para shahabat memberikan uangnya lebih dahulu untuk hinthah dan sya'ir yang akan diserahkan di masa tertentu. Ia (A. Hasan) pun mengemukakan juga riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan lainnya, bahwa Rasulullah saw. membeli gandum 30 sha' dari seorang Yahudi atas jalan hutang dengan menggadaikan baju besinya. Ini pun berlawanan dengan hadis-hadis yang melarang berjual beli dengan hutang. Dengan beberapa keterangan lain, juga beliau mensitir kesimpulan dari penulis Subulussalam dan Nailul-Authar bahwa telah ijma ulama pada membolehkan jual beli benda-benda ribawi yang berlainan jenis dengan bertempo, yakni tidak tunai. Dalam

pemandangan beliau selanjutnya, beliau merasa keberatan menerima hadis-hadis riba fadhal itu, karena bertentangan dengan perbuatan Nabi saw. sendiri, yaitu ia pernah pinjam gandum dan kurma, sedangkan hadis-hadis riba fadhal melarang yang demikian. Kata beliau selanjutnya: "Sekiranya hadis-hadis riba fadhal itu memang pernah diucapkan oleh Nabi saw., tentulah tersiar luas di antara shahabat-shahabat, karena perkara jual beli, pinjam-meminjam dalam benda riba fadhal, merupakan pokok penghidupan orang-orang di masa itu, dan berlaku tiap hari, bahkan hampir tidak ada manusia yang bisa terlepas daripada mu'āmalah, dan mustahil tidak diketahui oleh orang-orang seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Usamah dan lain-lainnya, hingga mereka menyalahinya.

Beliau tandaskan pula bahwa fikiran menentang laranganlarangan Hadis-hadis riba fadhal yang terlalu menyempitkan, bahkan tidak salah jika dikatakan: fikiran tidak mau terima bahwa Nabi saw. pernah mengatakan hadis-hadis itu. Kalau kita perhatikan dari segi hikmahnya, maka tidak terdapat satu pun yang ma'qul pada larangan Hadis-hadis riba fadhal itu, sedang di dalam semua larangan-larangan syara' tentang perkaraperkara keduniaan, dapat difikirkan dan diterima alasannya atau hikmahnya, walaupun ada yang ringan dan ada yang berat.

Oleh karena hadis-hadis riba fadhal itu sulit diterima oleh pikiran, maka ada ijma' yang menyalahinya, tersebut itu ada sebagian ulama yang *menta'wīl* bahwa larangan riba fadhal itu bukan larangan haram, tetapi *saddu al-dzari'ah*, untuk menutup peluang riba yang betul-betul diharamkan. *Ta'wīl* tersebut dapat diterima, karena seluruh hadis-hadis riba fadhal tidak terdapat perkataan haram atau mengharamkan, hanya larangan, sedang larangan itu bisa juga dipakai untuk larangan makruh. Demikian antara lain pendapat A. Hasan. Pembicaraan fuqaha mengenai riba fadhal ini cukup panjang, tetapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu 'alam!

6) Hikmah Larangan Riba

Riba termasuk perkara mu'āmalah atau keduniaan yang diharamkan agama. Manakala suatu perbuatan dipandang munkar, maka tidak lain karena perbuatan itu mendatangkan madarat dan keburukan. Demikian pula riba, dilarang Allah bukan hanya sekedar ujian bagi manusia taqwa, melainkan karena perbuatan itu mendatangkan kerusakan, baik bagi diri pelakunya maupun bagi masyarakatnya.

Perbuatan memakan riba, adalah manifestasi dari mentalitas yang egois, individualis dan kapitalis.

Abul A'la al-Maududi dalam kitab Riba, mengungkapkan: Apabila kita perhatikan riba dan kita perinci secara psikologis, niscaya nyata kepada kita bahwa riba itu tidak timbul dari alam pikiran secara murni, melainkan dipengaruhi oleh sifat egoisme, kikir, sempit dada, hati yang membatu, memperhambakan diri kepada harta, rakus kepada benda dan sifat-sifat rendah lainnya.

Al-Maududi selanjutnya mengimbau untuk melakukan perbandingan dengan urusan-urusan keuangan yang ditegakkan di atas dasar zakat dan shadaqah, di sana akan didapati suatu pola berfikir yang lahir dari hakikat kemanusiaan yang paling dasar, sejak ia berniat, sampai ia menunaikannya dalam perbuatan semata-mata terjadi karena pengaruh sifat-sifat kedermawanan, murah hati, mengutamakan kepentingan orang lain, kasihmengasihi, tolong-menolong, luas hati, lapang dada, tinggi semangat dan sifat-sifat mulia lainnya. Dari tinjauan ini dapat disimpulkan bahwa dari segi moral, riba merusakkan mental dan kepribadian manusia. Sebaliknya zakat dan shadaqah melatih dan meningkatkan jiwa ke jenjang kemuliaan. Manakala dari segi pembinaan kejiwaan begitu buruknya riba, maka sudah tentu keburukan itu akan menjalar pula dalam kemasyarakatan. Apabila riba ini sudah membudaya, maka kian dalamlah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, yang kaya bertambah kaya

sebagai hasil dari pemerasannya, sedangkan yang miskin tambah miskin karena terus dihisap oleh lintah darat.

Apabila keadaan itu berlangsung terus, maka akan timbullah berbagai krisis sosial dan tindak kriminal yang merajalela seperti, pencurian, perampokan, perjudian dan lain sebagainya.

Terdapatnya keadaan yang kontras antara lintah darat dengan kaum F uqara yang terperas, maka lintah darat akan kian sombong dan angkuh karena merasa dirinya kuat dan kuasa, dan orang-orang miskin menjadi dengki dan benci kepada orang-orang kaya. Demikianlah riba dapat menimbulkan konflik sosial dan mengundang pertentangan yang lebih dahsyat lagi apabila keadaan itu telah mencapai puncaknya. Keadaan ini bertentangan sekali dengan masyarakat yang dilandasi oleh jiwa kedermawanan (shadaqah) dan tolong-menolong. Uluran tangan orang kaya melalui zakat dan shadaqah atau memberikan pinjaman tanpa riba, menjembatani hubungan ukhuwah dan merentangkan tali kasih sayang antara kedua belah pihak, sehingga jurang pemisah antara keduanya berangsur menjadi dangkal dan dekat, bahkan dapat hilang sama sekali.

Masyarakat ideal yang demikian, akan memusnahkan secara otomatis sifat iri hati orang miskin dan kesombongan orang kaya. Sebab bagaimana mungkin bisa timbul iri hati, kebencian dan kesombongan dari masing-masing pihak, jika tali kasih sayang di antara keduanya demikian kuat berkat zakat, shadaqah atau pinjaman tanpa riba. Dari segi ekonomi, riba juga mendatangkan kerusakan. Lintah darat sudah terbiasa memperoleh keuntungan yang mudah dengan jalan memungut riba, sehingga tidak ada lagi ikhtiar untuk menempuh jalan lain yang lebih produktif dan berskala besar.

Apabila sikap ini sudah menjalar di antara para usahawan, maka lumpuhlah semangat kerja, dan akibatnya produksi pun menurun. Gagasan untuk membuka

lapangan kerja baru yang lebih produktif menjadi hilang, karena menurut pikiran mereka, buat apa bersusah payah membuka industri atau lapangan kerja baru yang belum pasti mendatangkan keuntungan, sedangkan lapangan riba sudah pasti mendatangkan laba dan tanpa banyak resiko dan kesulitan. Di lain pihak orang-orang dilatih memperoleh uang dengan cara yang mudah, yakni meminjam atau menggadaikan barang. Sifat suka "main pinjam" dan sering "main gadai", sebenarnya merupakan sikap mental yang negatif. Sikap ini menghilangkan kerajinan berusaha dan melumpuhkan semangat kerja, dan tentu saja menurunkan produksi segala macam barang kebutuhan masyarakat. Tegasnya perbuatan riba ini menghilangkan semangat kerja yang produktif bagi kedua belah pihak.

Demikian antara lain hikmahnya Allah mengharamkan riba, Allah bermaksud baik, yakni untuk memelihara hamba-hambanya dari mafsadat dan keburukan.

e. Jauh dari unsur *garar* (tidak jelas) dalam mendapatkan harta.

Segala barang yang samar atau mengandung kesamaran (*garar*) pada prinsipnya haram diperjual-belikan, karena hal itu dapat menimbulkan pertengkaran. Prinsip ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah ra:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَصَاةٍ، عَنْ بَيْعِ غَرٍّ⁵²

Artinya:

Sesungguhnya Nab! saw. melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli yang samar (*garar*). (HR. Muslim)

Menurut keterangan Imam Nawawi, larangan berjual beli *garar* ini merupakan salah satu prinsip syara, yang di dalamnya menyangkut banyak sekali persoalan. Dalam hubungan ini, fuqaha memberikan pengecualian beberapa barang yang tidak dapat dihindari kesamarannya misalnya; pengikut barang-barang yang dibeli seperti rumah dengan fundamennya yang terpendam di dalam tanah dan air susu hewan yang

⁵²Husain Muslim Ibn al-hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Shahih Muslim*, h. 3.

mengikuti hewannya. Demikian juga dikecualikan barang-barang yang menurut adat kebiasaan dilakukan toleransi, karena nilainya yang rendah atau karena kesulitan menilainya seperti: kapas dalam lapisan jas. Dalam hadis Nabi saw. ditemukan sejumlah contoh barang-barang yang terlarang diperjual belikan karena kesamarannya, yang pada umumnya merupakan praktek jual beli yang telah berlangsung semenjak zaman jahiliah, lalu Islam meluruskannya dalam rangka pembinaan hubungan antar manusia yang harmonis. Di antara barang-barang yang mengandung kesamaran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Buah-buahan yang masih hijau

Yakni buah-buahan yang belum nyata baiknya (jual beli secara ijonan).

- 2) Barang yang tidak ada, yang dimaksudkan di sini ialah sesuatu yang belum dimiliki atau belum lahir, karena hal itu mengandung kesamaran dan dapat mengakibatkan pertengkaran di kemudian hari, apabila barang yang sudah dibayar tidak kunjung diserahkan atau barangnya menyalahi keterangan semula. Dalam hubungan ini ada hadis dari Hakim bin Hazam bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَا يَسَّ عِنْدَكَ⁵³

Artinya:

Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu

Hadis tersebut terdapat dalam kitab-kitab Sunan dan Musnad. Menurut keterangan Tirmidzi derajatnya Hasan.

Berhubung ada Hadis yang membenarkan jual beli secara salam atau salaf (indent), maka larangan itu dapat ditafsirkan kepada barang yang tidak ada di tangan, tanpa sifat, tanpa ukuran, tanpa timbangan dan tanpa jadwal waktu penyerahan yang

⁵³Abu 'Isa Muhammad Ibn 'Isa al-Tirmizi, *Jami' al-Kabir* (Beirut: Dar al-Gorbi al-Iskami, 1996), h. 514.

jelas. Adapun menjual barang secara indent (salaf = salam) dengan ukuran yang jelas, timbangan yang jelas dan dengan jadwal waktu penyerahan yang jelas, maka hal itu tidaklah terlarang. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ketika Nabi saw. datang ke Madinah, mereka biasa mencengkrami (memanjar) buahbuahan untuk masa setahun atau dua tahun, maka beliau memberikan petunjuk: "Barangsiapa yang mencengkrami buahbuahan, maka hendaklah ia mencengkrami pada sukatan yang tertentu, timbangan yang tertentu dan buat satu masa yang tertentu". Dari sini dapat difahamkan hikmah syariat Islam dalam larangan ini, tidak lepas dari tujuan menghindari keburukan dan menutup jalan-jalan yang membawa kepada pertengkaran dan kerugian salah satu pihak (*saddu al-zari'ah*).

3) Kandungan dalam perut binatang

Kandungan dalam perut binatang, termasuk barang yang samar. Karena itu tidak boleh diperjual belikan. Dalam hubungan ini ada hadis riwayat Abi Said al Khudri ra:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رِقَاقٍ فِي بَطْنٍ لَا نَعْلٍ حَتَّى تَضَعَ، عَمَّا فِي ضَرْعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ، عَنْ رِقَاقٍ عَبْدٍ هُوَ آبِقٌ، عَنْ رِقَاقٍ مَغَانِمٍ حَتَّى تُقَسَّمْ، عَنْ رِقَاقٍ صَدَقَاتٍ حَتَّى تُقْبِضَ، عَنْ ضَرْبَةٍ غَائِصٍ⁵⁴

Artinya:

Nabi saw. melarang menjual anak binatang yang masih dalam perut binatang (induknya), hingga ia dilahirkan, menjual susu yang masih berada dalam teteknya, menjual hamba yang lari, menjual rampasan perang hingga dibagi, menjual zakat hingga diterima dan menjual hasil penyelaman (hingga nyata hasilnya). (HR. Ibnu Majah, al-Bazzar dan Daraquthni)

⁵⁴Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996), h. 377

Hadis ini lemah, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Syahr bin Hausyab yang dipandang lemah oleh segolongan ahli Hadis. Tetapi Bukhari dan Imam Ahmad memandangnya berada pada derajat Hasan.

Mengenai larangan menjual janin yang ada dalam kandungan ternak, ulama telah sepakat tentang haramnya.

4) Susu dalam tetek

Susu yang masih berada dalam tetek binatang ternak, termasuk barang yang samar. Karena itu terlarang diperjual belikan, dalil naqlinya bersandar pada Hadis Abu Said al-Khudri tersebut di atas.

5) Budak yang melarikan diri, yang demikian itu terhalang penyerahannya, karenanya tidak boleh diperjual belikan. Larangan penjualannya juga bersandar kepada dalil tersebut di atas.

6) Rampasan Perang (*ghanimah*) sebelum dibagi

Rampasan perang yang belum dibagi berarti belum dimiliki, dan belum jelas jumlahnya. Karena itu terlarang diperjual belikan.

7) Zakat yang belum diterima

Memperhatikan hadis riwayat Abi Said al-Khudri tersebut, maka zakat yang belum diterima termasuk barang yang tidak boleh diperjual belikan, karena barang tersebut belum jadi milik penerima zakat, sebelum penerimaan menjadi kenyataan. Tetapi para fuqaha mengemukakan pengecualian zakat yang belum diterima tapi bagiannya sudah pasti. Sekalipun belum diterima, tetapi karena bagiannya telah pasti dan jelas, mereka hukumkan seperti telah menerima haknya.

8) Ikan dalam air

Menjual ikan yang masih dalam air, semacam tambak, empang dan sebagainya termasuk perkara yang samar. Boleh jadi ikan yang kecil diperkirakan besar dan sebaliknya yang besar diperkirakan kecil, yang banyak dikira sedikit dan sebaliknya

yang sedikit dikira banyak. Kesamaran lainnya ialah kesulitan dalam penangkapannya, sehingga tidaklah semua ikan yang dijual dapat diambil, apabila air tambak itu banyak.

Berkenaan dengan kesamaran dan ketidak pastian tersebut, maka menjadilah terlarang memperjual belikan ikan yang masih ada dalam air. Dalam hubungan ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud r.a. bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

لَا تَشْتَرُوا فِي مَاءٍ فَإِنَّهُ غَرٌّ⁵⁵

Artinya:

Janganlah kalian membeli ikan yang ada dalam air, karena dia itu *garar*(samar). (H.R. Ahmad, dan ia menerangkan bahwa Hadis itu sebenarnya mauquf)

Fuqaha telah memisah-misahkan persoalannya, sebagian mereka berkata:”Jika airnya itu banyak dan hanya dapat diambil dengan mengail, tetapi mungkin juga tidak berhasil, maka jual beli seperti itu tidak sah. Tetapi jika airnya sedikit dan dapat diambil dengan pancingan, maka boleh menjualnya, tetapi ada hak khiyar. Jika penangkapan ikannya tidak perlu pancingan, maka menjualnya sah, tetapi ada hak khiyar sesudah dilihat ikannya.

Pemisahan yang seperti ini didasarkan kepada beberapa alasan, dan illat yang disebutkan mengkhususkan larangan yang umum itu. Demikian antara lain dikemukakan Imam al-Shan’ani dalam kitab Subulus-Salam.

9) Bulu masih di tubuh binatang

Dari Ibnu Abbas ra:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، لَا يُبَاعُ صَوْ عَلَى هَرٍ، لَا بَنُّ فِي ضَرْعٍ (طَبْرُ نِي فِي لَأَسَط، دَقَطْنِي)⁵⁶

Artinya:

⁵⁵Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang dalam Islam*, h. 137.

⁵⁶Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang dalam Islam*, h. 138.

Rasulullah saw. melarang memperjual belikan buah yang belum dapat dimakan, bulu yang masih di tubuh binatang dan susu yang ada dalam tetek. (HR. Thabarani dan Daraquthni)

Zhahir hadis ini melarang menjual bulu yang masih melekat pada tubuh hewan.

Dalam hubungan ini pendapat fuqaha terbagi dua:

Segolongan fuqaha berpendapat, bahwa tidak sah menjual bulu yang masih melekat di tubuh binatang. Sebab bulu binatang yang hendak dipotong itu masih diragukan sedikit banyaknya (kwantitasnya). Inilah yang dipegangi oleh al-Hadi, as-Syafi'i dan Abu Hanifah. Segolongan fuqaha berpendapat, penjualan yang demikian itu sah, karena barangnya tidak samar, dapat dilihat dan dapat diserahkan. Hukumnya sah seperti sahnya menjual binatang yang disembelih. Pendapat ini dianut oleh Imam Malik dan lain-lain. Menurut mereka, riwayat tersebut di atas adalah ucapan Ibnu Abbas. Oleh karena yang menjadi persoalan di sini ialah bulu yang masih melekat di tubuh binatang, maka bulu yang telah dicukur atau dilepas dari tubuh binatang, misalnya bulu biri-biri untuk keperluan pembuatan tekstil, maka hal ini sudah tidak diragukan lagi kebolehanannya (diperjual belikan).

10) Burung di udara

Burung yang terbang di udara atau tidak dalam sangkar termasuk barang yang samar. Karena itu tidak sah diperjual belikan, sebab tidak dapat diserahkan.

Fuqaha pengikut Syafi'iah berpendapat: Tidak sah menjual burung di angkasa, dan jual beli yang demikian itu dinamai jual beli *garar*. yang demikian itu dianggap sebagai barang jualan yang tidak jelas, antara kesanggupan menangkap atau tidaknya. Akan tetapi menurut kebiasaan, burung di angkasa sangatlah sukar menangkapnya, serta mengandung keraguan dapat/tidaknya kembali ke tempatnya. yang paling sering ialah tidak kembalinya. Maka dari itu tidaklah sah memperjual belikannya. Berbeda dengan lebah, penjualannya dibolehkan.

Golongan Hanafiah berpendapat: Apabila seseorang menangkap burung kemudian dilepaskannya ke angkasa, maka penjualan "Ya itu rusak karena ketidak

sanggupan menyerahkannya. Tetapi apabila sanggup menyerahkannya setelah jual beli, maka satu qaul mengembalikan kepada kebolehan dan satu qaul meniadakan kebolehan. Dan yang jelas apabila menjual burung di angkasa yang belum ditangkap, maka jual belinya menjadi batal, karena sama dengan menjual barang yang belum jadi miliknya. Adapun menjual burung merpati, hukumnya sah walau masih di angkasa, karena menurut kebiasaan merpati itu kembali ke tempatnya. Adapun lebah, maka sah memperjual belikannya apabila sedang berkumpul.

Madzhab Maliki berpendapat: Tidak sah memperjual belikan barang yang terbang di angkasa. Juga tidak sah memperjual belikan burung yang bergerombol, apabila ada burung yang kecil-kecil menyelip di sela-selanya, seperti burung-burung kecil bersama ayam dan merpati, yang mana tidak memungkinkan mengetahui dengan pasti. Tetapi apabila pihak pembeli dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka boleh diperjual belikan. Begitupun tidak sah menjual merpati yang ada dalam kandang tanpa diketahui kadarnya (jumlahnya). Tetapi apabila diketahui sebelum pembelian, maka sah jual beli itu.

Ulama Hanabilah berpendapat: "Tidak sah menjual burung di udara, baik burung yang jinak dipanggil pulang maupun yang tidak, begitupun tidak sah menjual lebah di udara, karena tidak dapat diserahkan. Tetapi apabila berada di tempat yang tertutup, misalnya dalam sangkar dan mudah mengambilnya, maka sahlah penjualannya. Begitupun sah menjual lebah di sarangnya, apabila pembeli menyaksikan masuknya ke dalam sarang.

Demikian antara lain keterangan para fuqaha yang merupakan hasil ijtihad masing-masing dalam menentukan kedudukan hukum antara yang samar dan yang tidak samar dalam hal penjualan burung.

Selain itu, setiap perolehan harta harus mempertimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga nilai-nilai Ilahiyah tidak diabaikan.

Selain itu, nilai-nilai sistem ekonomi Islam mengandung nilai keadilan dan persaudaraan menyeluruh, antara lain adalah.

- a. Keadilan sosial, yaitu mempunyai derajat yang sama, nilai yang membedakannya yaitu ketaqwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan kemanusiaan.
- b. Keadilan ekonomi, yaitu setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing, dan tidak mengambil hak orang lain.
- c. Keadilan distribusi pendapatan, yaitu pendistribusian pendapatan dan kekayaan alam yang kepada masyarakat dengan adil. Misalnya, menghapuskan monopoli, menjamin hak dalam proses ekonomi, distribusi dan lain lain.
- d. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial, yaitu hanya tunduk kepada Allah. Hal ini sebagaimana terdapat dalam QS al-Ra'ad/13 :36.

وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبٌ ۝٦٦

Terjemahnya:

"Dan orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa (Kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan ada diantara golongan (Yahudi dan Nasrani), yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, "Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".⁵⁷

Lebih lanjut, ketundukan manusia kepada Allah secara mutlak dinyatakan juga dalam QS Lukman/31: 32.

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝٣٢

Terjemahnya:

"Dan apabila mereka digulung oleh ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya. Akan tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap

⁵⁷Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 254.

menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat Kami hanyalah penghianat yang tidak berterima kasih".⁵⁸

Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial bukan berarti kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibatasi dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karenanya, kebebasan individu dibatasi dengan prinsip-prinsip yaitu, kepentingan masyarakat harus didahulukan, melepaskan kesulitan harus diprioritaskan dibandingkan memberi manfaat, kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil.

Dengan demikian, nilai-nilai sistem ekonomi Islam dibatasi dengan norma norma yang telah diatur oleh Allah swt. antara lain, menekankan pada proses mendapatkan harta, cara-cara yang baik, tidak mengandung *maisir*, *garar*, *riba*, dan *batil*. Selain itu, sistem ekonomi Islam mengandung nilai keadilan dan persaudaraan menyeluruh.

B. Tinjauan Umum Tentang Produk-Produk Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Istilah bank berasal dari kata *bangue* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yakni : *pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).⁵⁹

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁶⁰

⁵⁸Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 414.

⁵⁹M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Cet. IV. Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006), h. 2.

⁶⁰ Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux (Semarang : CV.Widya Karya, t.th), h. 75.

Pengertian bank Syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadis.⁶¹

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.⁶²

Sedangkan menurut Sutan Remy Shahdeiny Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip Syariah.⁶³

Menurut ensiklopedi Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, bank Islam berarti bank yang cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni mengacu pada ketentuan

⁶¹Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah?* (Cet. I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 33.

⁶²Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah?* h. 33.

⁶³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Cet. III. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 1.

yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat.⁶⁴

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁶⁵

Sedangkan Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah, “Perbankan Syariah” adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁶⁶

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan Syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata Syariah dalam versi bank Syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Jadi penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi Bank Syariah. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank Syariah biasa disebut *Islamic banking* (bank Islam) atau *interest free banking* (bank tanpa bunga), yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*ribā*), spekulasi (*Maisīr*), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (*garar*). Bank

⁶⁴Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.49.

⁶⁵M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (Bandung: CV Pustaka Setia, t.th), h. 98.

⁶⁶Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Cet. I. Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 4.

Syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.⁶⁷

Menurut Ismail, bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun membayar bunga kepada nasabah.⁶⁸

Jadi, penulis berkesimpulan bahwa bank Syariah adalah bank yang operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

2. Karakteristik Bank Syariah

Berdasarkan beberapa pengertian yang disebutkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa pengertian bank Syariah itu tidak jauh berbeda dengan pengertian Bank pada umumnya sesuai dengan pendapat Peraturan Kebijakan Perbankan yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang terletak pada prinsip operasional yang dipergunakan. Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, sedangkan bank konvensional berdasarkan prinsip bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank Syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada bank konvensional sebagai kreditur dan debitur.

Bank Syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank Syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan

⁶⁷Siradjuddin, *Peran Ulama dan Ulama dalam Pengembangan Perbankan Syari'ah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 16.

⁶⁸Ali zainuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 21.

membebaskan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Bank Syariah dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang menggunakan prinsip Syariah.⁶⁹

Kegiatan bank Syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik:

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuk.
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*).
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas.
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat *spekulatif*.
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.⁷⁰

3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan Syariah berdasarkan pada al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam falsafah dasar beroperasinya bank Syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.⁷¹

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif,

⁶⁹Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 40.

⁷⁰Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah Berdasarkan PSAK dan PAPI* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2005, h. 74.

⁷¹Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah?* h. 33.

system pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen.

Daya tahan perbankan Syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami negative spread seperti bank konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (*ribā*), tidak transparan (*garar*), dan (*maisīr*) spekulatif.⁷²

Dalam hal ini, masing-masing pihak menerima hak yang sesuai secara proporsional tanpa melebihi haknya atas pihak lain. Sementara itu, transaksi juga dikatakan sesuai prinsip Syariah jika tidak terdapat unsur riba. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁷³

4. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank Syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank Syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya intensif pendirian bank Syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober

⁷²Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 64.

⁷³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13.

(Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga.⁷⁴

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank Syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank Syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank Syariah , tahun 1992 dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip Syariah , kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip Syariah , dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah .⁷⁵

Pengaturan (regulasi) perbankan Syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank Syariah .

5. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank Syariah juga bertujuan sebagai berikut :

⁷⁴M. Syafi'i Antonio, *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, h. 6.

⁷⁵Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah* (Jakarta : t.p, 2011), h. 5.

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank Syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank Syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank Syariah dapat beroperasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain.⁷⁶

6. Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan Syariah terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).⁷⁷

a. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)

1) Tabungan

⁷⁶Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah?* h. 47.

⁷⁷M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, h. 133.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat *likuid*. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

2) Deposito

Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank Syariah dan/ atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan.

3) Giro

Giro menurut undang-undang perbankan Syariah nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus

kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal, bergantung pada kebaikan pihak bank.

Prinsip operasional bank Syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudārabah*. Berikut ini penjelasannya:

a) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah* yang amanah. Bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah penyimpan dana. Namun demikian, rekening ini tidak boleh mengalami saldo negative (*overdraft*). Landasan hukum prinsip ini adalah :

I. QS al-Nisā/4 : 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”⁷⁸

II. Al-hadis :

لَا إِثْمَ عَلَىٰ مَنْ عَثَمَكَ، لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (بو٥٥٥٥)⁷⁹

Artinya:

“Sampaikan (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”

⁷⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 86.

⁷⁹Abu Dāud Sulaimān bin al-Asy'at al-Sijistān, *Sunan Abu Dāud*, Juz 2 (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 497

b) Prinsip *Muḍārabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *muḍārabah*, penyimpan dana atau deposit bertindak sebagai shahibul mal (pemilik modal) dan bank sebagai *muḍārib* (pengelola). Bank kemudian melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah peminjam yang membutuhkan dengan menggunakan dana yang diperoleh tersebut, baik dalam bentuk *murābahah*, *ijārah*, *muḍārabah*, *musyārahah* atau bentuk lainnya. Hasil usaha ini selanjutnya akan dibagihasilkan kepada nasabah penabung berdasarkan nisbah yang disepakati. Apabila bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi.

b. Produk Penyaluran Dana/ Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti *bai' murābahah*, I dan *bai' al istishna*.
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi *ijārah* dan *ijārah muntahiya bi al tamlik*.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi *musyārahah*, *muḍārabah*, *muzāra'ah*, dan *musāqah*.

c. Produk Jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank Syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat

imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain sebagai berikut :

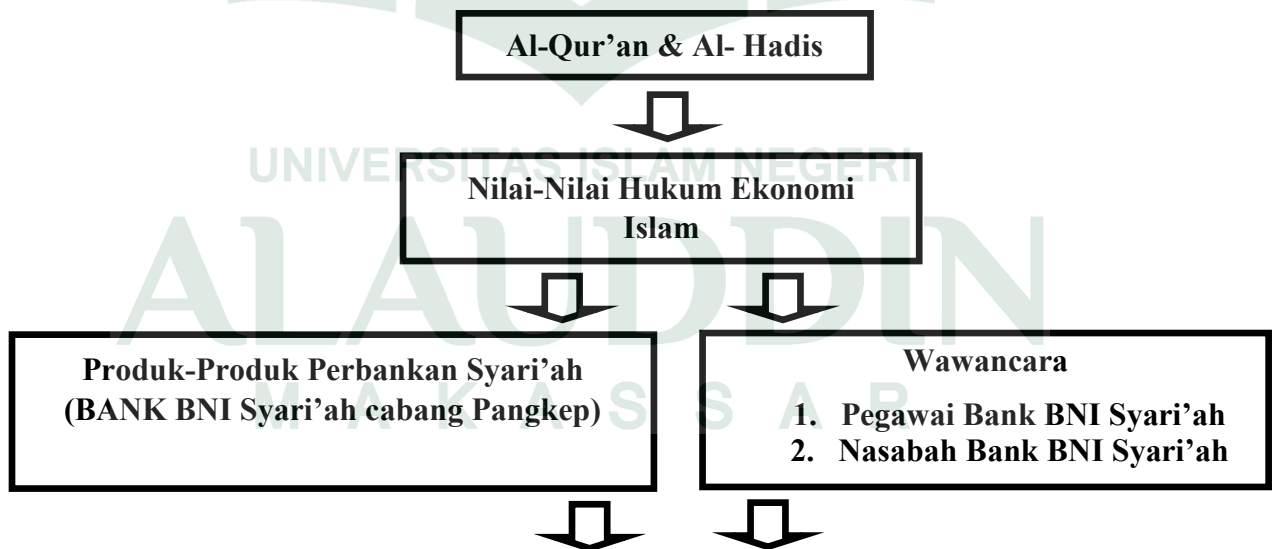
1) *Sharf* (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya, jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikkan pada bank Syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual beli valuta asing.

2) *Wadi'ah* (titipan)

Pada dasarnya, dalam akad *wadi'ah* yad dhamanah penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa berhak untuk menggunakannya. Dia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).⁸⁰

C. Kerangka Konseptual



⁸⁰M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, h. 191.

**Keserasian antara
Teori & Praktek**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Pada hakikatnya penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada hakekatnya adalah sama, yakni merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian peneliti akan menjelaskan jenis dan lokasi penelitian agar dapat diketahui jenis penelitian yang digunakan serta batasan lokasi penelitian.

1. Jenis Penelitian

Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.¹Sementara menurut Suharsimi Arikunto penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi serta

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 63.

mengumpulkan informasi suatu gejala yang dengan menggambarkan suatu keadaan menurut “apa adanya” mengenai suatu gejala atau keadaan.²

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yaitu mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian yang berjalan dan menyungguhkan apa adanya. yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³

Dalam hal ini, penelitian dilakukan melalui observasi langsung pada pegawai dan nasabah BNI Syari'ah cabang Pangkep. Dengan judul Penerapan Hukum Islam pada Perbankan Syari'ah (Studi pada BANK BNI Syari'ah cabang Pangkep).

2. Lokasi Penelitian

Menurut S. Nasution bahwa ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penelitian antara lain adalah menetapkan lokasi, tempat, pelaku dan aktifitas kegiatan.⁴ Mengenai lokasi penelitian yang akan menjadi fokus penelitian adalah sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di BANK BNI Syari'ah cabang Pangkep. Adapun alasan dipilihnya BANK BNI Syari'ah cabang Pangkep sebagai lokasi penelitian ini karena Lokasi ini dengan pertimbangan bahwa penelitian yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal di dalam penelitian dengan juga letaknya strategis dan relatif mudah dijangkau transportasi, serta menjadi salah satu cabang di

²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 99

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6.

⁴S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996), h. 43.

Makassar yang memiliki pemasukan yang stabil di tiga tahun terakhir. sehingga menjadi alasan mengapa peneliti memilih lokasi ini menjadi tempat penelitian tesis ini.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai bagian yang integral dalam suatu penelitian agar penelitian tersebut lebih fokus pada kajian sesuai dengan disiplin ilmu yang dibahas. Maka Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Fenomena yang diangkat akan didekati melalui aspek yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum Islam yang digunakan dalam membuat sebuah produk.

Pendekatan sosiologis berdasarkan pola interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar responden. Untuk mendukung data yang akan diperoleh, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap aspek sosiologis dari pegawai dan nasabah BNI Syari'ah cabang Pangkep. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa obyek yang diteliti. Obyeknya yaitu produk produk BNI Syari'ah, dengan menganalisa sejauh mana nilai-nilai hukum Islam telah diterapkan pada setiap produknya dan sejauh mana pemahaman para pegawai dan nasabahnya terkait dengan hukum Islam pada perbankan syari'ah.

C. Sumber Data

Pada penelitian kualitatif, sumber data dipilih langsung oleh si peneliti dengan mengambil beberapa informan yang dapat memberikan informasi yang lebih akurat serta bobot nilai yang lebih besar.

Sumber data penelitian ini juga diperoleh dari buku-buku dan bahan bacaan yang relevan dengan pembahasan tesis ini tentang implementasi hukum Islam pada perbankan syari'ah teori dan praktik. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, lapangan dan data pustaka yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer di samping perundang-undangan yang mempunyai otoritas adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan.⁵

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian di lapangan. Dalam memperoleh data ini, peneliti berhadapan langsung dengan informan untuk mendapatkan data yang akurat, agar peneliti dalam melakukan pengolahan data tidak mengalami kesulitan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pegawai dan nasabah BNI Syari'ah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang berhubungan dengan sumber primer, seperti buku-buku yang terkait dengan objek yang diteliti. Baik berupa kitab fiqih, undang-undang dan berbagai penelitian yang terkait dengan penelitian serta menelaah dokumen lainnya digunakan oleh peneliti untuk menguatkan hasil temuan di lapangan. Seperti keterangan dokumen pedoman pelaksanaan pembiayaan mikro dan standar operasional perusahaan.

3. Data Tersier

Data tersier berupa bahan bacaan lain, karya ilmiah, literature-literature hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam penelitian tesis ini.

D. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Mengenai pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara. Alasan penggunaan beberapa cara ini sebagai cara bagi

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 142.

peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang akurat serta memiliki nilai validitas. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁶ Teknik observasi lapangan ini digunakan untuk mengamati hal-hal yang terkait dengan fokus penelitian baik dari segi tempat penelitian, kesediaan responden, penyesuaian kuesioner, dan sebagainya.

2. Wawancara atau interview terpimpin

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.⁷ Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu sebagai pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).⁸ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal informan lebih mendalam.⁹ Menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode *interview* adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.

⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.

⁷Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Askara, 2004), h. 58.

⁸Soemitro Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.

⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 72.

- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.¹⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen, berupa buku pedoman perusahaan yang mengatur tentang produk, kebijakan dan dasar hukum perusahaan.

E. Instrumen Penelitian

Terdapat dua hal utama yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci dari penelitian disesuaikan dengan yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis instrumen sebagai berikut:

1. Pedoman observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data yang digunakan pada saat proses penelitian. Dalam melakukan observasi, instrumen yang penulis gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis.
2. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa catatan-catatan pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan data. Dalam wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, handphone yang memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital. Pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah penulis mengingat pokok-pokok permasalahan proses wawancara dilaksanakan. Slip digunakan untuk mencatat hasil wawancara. Slip diberikan identifikasi, baik nomor maupun nama informan. Selama wawancara berlangsung untuk diabadikan sebagai alat bukti

¹⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R & D*, h. 138.

penelitian. Penggunaannya dapat meminimalisasi kemungkinan kekeliruan penulis dalam mencatat dan menganalisis hasil wawancara.

3. Pedoman dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung, dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta foto-foto wawancara dengan beberapa pegawai dan nasabah BNI Syari'ah cabang Pangkep.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹¹ Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, selanjutnya memilih data yang penting dan akan dianalisa, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang obyektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh penulis dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan data kualitatif dengan cara:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan aktivitas memilih dan memilah data yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Dengan demikian reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya.

¹¹Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 209.

2. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data dalam bentuk kualitatif yakni setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, dimana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau ke dalam bentuk naratif deskriptif (pengungkapan secara terstulis).¹² Dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan penelitiannya sehingga peneliti mampu mengambil suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi data

Langkah ketiga dalam pengelolaan data dalam penelitian kualitatif, adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis dalam bentuk naratif, kemudian melalui induksi data tersebut disimpulkan. Kesimpulan di verifikasi selama penelitian berlangsung. Analisis data ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang disimpulkan sehingga memudahkan penulis dalam menafsirkannya.¹³

Setelah semua data terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka data-data tersebut akan dianalisa kedalam analisis kualitatif yang merupakan teknik pengeolaan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian.

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada

¹²Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 249.

¹³Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 99.

kemampuan peneliti mengkontruksi fenomena yang diamati, serta bentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Dalam objek yang sama peneliti yang berlatar belakang pendidikan akan menemukan data yang berbeda dengan penelitian yang berlatar belakang Hukum, Manajemen, Antropologi, Sosiologi, Kedokteran, Teknik dan sebagainya.

Menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (Validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas). Dalam hal menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan hal-hal di luar data untuk menguji kevalidasian data yang telah didapat. Peneliti memeriksa keabsahan data dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi.

Pengujian data dengan cara membandingkan hukum Islam yang mengatur tentang perbankan syari'ah dengan observasi dari dokumen pedoman perusahaan dan data hasil wawancara dengan beberapa pegawai dan nasabah BNI Syari'ah cabang Pangkep.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah :

1. Data yang di dapatkkan melalui wawancara dibuat transkrip wawancaranya;
2. Transkrip wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian di deskripsikan ke dalam bentuk tulisan; dan
3. Data yang telah di deskripsikan diuji keabsahan dengan membandingkan data dari berbagai sumber.

BAB IV

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM EKONOMI ISLAM PADA

PRODUK-PRODUK BANK BNI SYARIAH CABANG PANGKEP

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya BNI Syariah Cabang Pangkep

Tempaan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 pilarnya yakni, adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang undang No.10 tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di beberapa daerah yakni Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya Unit Usaha Syariah BNI terus mengalami berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Kemudian pada bulan juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 kantor cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas dan 22 Mobil Layanan Gerak.¹ Dan Salah satu dari kantor cabang tersebut adalah tempat penulis melakukan penelitian yang lokasinya bertempat di Jl. Kemakmuran Poros Makassar-Parepare KM.51 Kel. Mappasaile Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep.

Pimpinan Unit BNI Syariah KCP Pangkep mengemukakan bahwa kebutuhan masyarakat akan perbankan yang berbasis syariah menjadi penyebab berdirinya BNI Syariah di berbagai tempat salah satunya adalah BNI Syariah KCP Pangkep di Jl. Kemakmuran Poros Makassar-Parepare KM.51 yang telah ada sejak tahun 2012 tepatnya pada tanggal 01 Februari 2010 sampai sekarang, inisiatifnya untuk

¹Ahmad, *Sejarah Berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah*, <http://> diakses 20 Maret 2018.

menghadirkan KCP BNI Syariah di lokasi tersebut melihat dari kebutuhan masyarakat dan lokasinya yang sangat tepat untuk membangun cabang pembantu karena masih kurangnya bank atau tempat penyimpanan uang masyarakat yang bersifat Islami. Di samping itu dengan adanya BNI Syariah di lokasi tersebut pimpinan dari BNI Syariah berharap akan membantu meringankan beban masyarakat dan membantu mengurangi pengangguran dengan melakukan kerjasama antara Bank BNI Syariah dengan masyarakat, baik itu bekerjasama dengan cara mempercayakan dananya kepada BNI Syariah maupun bekerjasama dalam hal meningkatkan usaha dengan cara menjadi pengelola usaha BNI Syariah KCP Pangkep. Selain itu, nasabah juga tidak perlu merasa khawatir akan mengalami kesulitan untuk mengakses Bank BNI Syariah di luar sana jika ingin melakukan transaksi karena Bank BNI Syariah juga bekerjasama dengan BNI Konvensional sehingga nasabah dapat menikmati dan mengakses layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional terdekat.²

Mutmainna Maruru menyatakan bahwa dengan adanya BNI Syariah Cabang Pangkep akan menciptakan suatu kemudahan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan transaksi dapat dilakukan dimana saja meskipun Bank atau ATM BNI Syariah terbilang masih kurang namun nasabah masih bisa menggunakan Bank atau ATM BNI konvensional.³

Pimpinan Unit BNI Syariah KCP Pangkep menjelaskan bahwa manajemen nilai-nilai Islam diterapkan berdasarkan unsur-unsur manajemen (POAC)), yakni Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*), ditambah lagi dengan proses evaluasi yang dilaksanakan setiap bulan untuk mengetahui perkembangan BNI Syariah Cabang Pangkep baik dari

²Asleny Hardianti (27 tahun) Customer service, *Wawancara*, Pangkep, 29 Maret 2018.

³Mutmainna Maruru (26 tahun) Teller, *Wawancara*, Pangkep, 29 Maret 2018.

segi peningkatan nasabah maupun kesuksesan dalam hal penerapan nilai-nilai Islam yang dilakukan oleh BNI Syariah KCP Pangkep.⁴

2. Visi dan Misi BNI Syariah

a. Visi BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja

b. Misi BNI Syariah

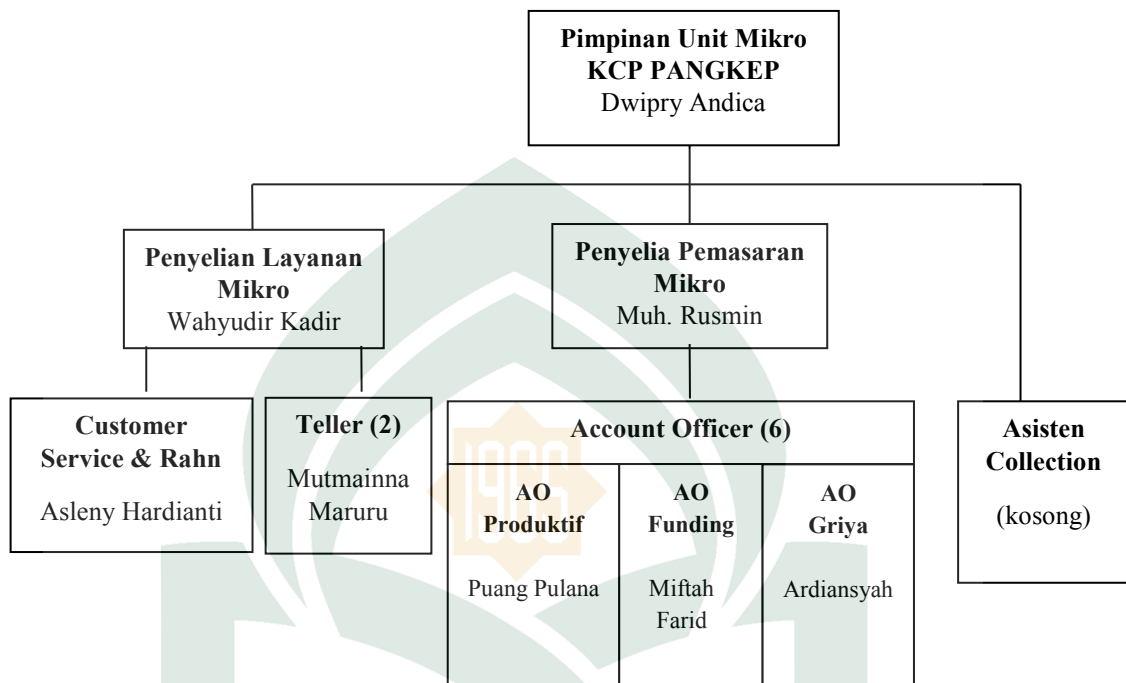
- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Visi dan misi inilah yang dijadikan sebagai panutan oleh seluruh karyawan BNI Syariah KCP Pangkep.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

⁴Dwipry Andica (34 tahun) Pimpinan Unit Mikro, *Wawancara*, Pangkep, 29 Maret 2018.

3. Struktur organisasi BNI Syariah KCP Pangkep



4. Sarana dan Prasarana BNI Syariah KCP Pangkep.

Menurut pimpinan dari BNI Syariah KCP Pangkep, berdasarkan manajemen Bank Syariah yang telah ditetapkan oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) sarana dan prasarana yang telah disiapkan dalam proses kegiatan BNI Syariah adalah hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan, karena hal tersebut adalah kebutuhan bersama. Sarana dan prasarana yang ada pada BNI Syariah, yaitu; ruang tunggu untuk nasabah, 1 Mushollah, dan ruang akad untuk nasabah.

B. Hasil Penelitian

1. Bentuk dan Sistem Pengelolaan Produk-Produk Bank BNI Syariah KCP Pangkep

a. Produk dana

1) Akad produk

Akad yang digunakan pada produk tabungan dalam penelitian ini ialah akad⁵*Muḍārabah muṭlaqah* (*muḍārabah*) dengan bonus/nisbah bagi hasil⁶ berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a) Nasabah pemegang rekening dana dengan akad *muḍārabah* akan menerima bagi hasil setiap bulannya sesuai nisbah yang diperjanjikan kepada nasabah dan dihitung menggunakan metode perhitungan bank.
- b) Untuk produk dana dengan akad *muḍārabah* Bank wajib menyatakan besarnya nisbah bagi hasil pada perjanjian bagi hasil dengan nasabah dan menunjukkan butir perjanjiannya dalam aplikasi pembukaan rekening yang ditandatangani bersama oleh nasabah dan pejabat bank yang berwenang.
- c) Besarnya nisbah ditentukan sesuai dengan tarif nisbah yang ditetapkan pada KALMA.
- d) Saldo di bawah saldo minimum tetap diberikan bagi hasil.
- e) Pada hari pertama nasabah belum memperoleh keuntungan bagi hasil.
- f) Untuk produk tabungan bagi hasil akan dihitung setiap akhir bulan setelah *End of Day* (EOD) dan saldo efektif pada tanggal 1.
- g) PPh atas bagi hasil dibuat langsung pada saat melakukan pengkreditan bagi hasil ke dalam rekening nasabah.
- h) Nasabah yang menutup rekening tabungan sebelum akhir bulan, sistem menghitung keuntungan bagi hasil sampai dengan tanggal penutupan.
- i) Pendapatan yang diperoleh dari nasabah yang dioperasikan dibagi secara proporsional.

2) Rumus perhitungan bagi hasil⁷

⁵BNI Syariah, *Pedoman Perusahaan Produk Dana (Ketentuan Umum Produk: akad dan bonus bagi hasil produk)*, h. 1

⁶BNI Syariah, *Pedoman Perusahaan Produk Dana (Ketentuan Umum Produk: akad dan bonus bagi hasil produk)*, h. 1

Rumus perhitungan bagi hasil ini dibagi dalam 2 (dua) tahap:

Tahap I: perhitungan pendapatan per produk

Giro	(B1)	$= (A1 \times B)/A$
Tabungan	(B2)	$= (A2 \times B)/A$
Deposito	(B3)	$= (A3 \times B)/A$
<i>Equity</i>	(B4)	$= (A4 \times B)/A$

Keterangan

A!	Total dana giro
A2	Total dana tabungan
A3	Total dana deposito
A4	<i>Equity</i>
B1	pendapatan cash giro
B2	pendapatan cash tabungan
B3	pendapatan cash deposito
B4	pendapatan cash <i>Equity</i>
B	pendapatan cash dari pembiayaan dan placement yang akan dibagihasilkan ke nasabah
A	Total Dana Pihak Ketiga (DPK) + <i>Equity</i>

Tahap II: Perhitungan penutupan Bagi Hasil Rekening

$$E = (C3/A3) \times B3 \times D$$

$$E = (C2/A2) \times B2 \times D$$

Keterangan :

E	=	Bagi hasil yang diterima
C3	=	Saldo rekening deposito milik nasabah
C2	=	Saldo rekening tabungan milik nasabah
A3	=	Total dana deposito
A2	=	Total dana tabungan
B3	=	Pendapatan cash deposito
D	=	Nisbah produk

Contoh perhitungan bagi hasil rekening

⁷BNI Syariah, *Pedoman Perusahaan Produk Dana (Ketentuan Umum Produk: akad dan bonus bagi hasil produk)*, h. 1-3.

i) Pak Budi memiliki rekening di BNI Syariah dengan rincian sbb:

- Deposito iB Hasanah 12 bulan senilai Rp 10.000.000,-

Nisbah deposito 12 bulan 60% : 40 %

- Tabungan iB Prima hasanah senilai Rp 10.000.000.-

Nisbah tabungan 35% : 65%

Deposito iB Hasanah pak Budi	C3	10.000.000
Nisbah deposito iB Hasanah	D	60%
Tabungan iB Prima hasanah pak Budi	C2	10.000.000
Nisbah tabungan iB Prima hasanah	D	35%

ii) Dana pak Budi serta nasabah lainnya disalurkan ke kantor usaha yang menguntungkan misalnya ke pak Rustan yang memiliki usaha industri batik.

iii) Dengan tambahan modal yang diperoleh, pak Rustan mengembangkan usahanya.

iv) Tiap bulan pak Rustan menyeter angsuran pembiayaan dan bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan usahanya ke Bank.

v) Komposisi dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Total dana pihak ketiga + <i>equity</i>	A	500.000.000
Giro	A1	50.000.000
Tabungan	A2	100.000.000
Deposito	A3	300.000.000
<i>Equity</i> *)	A4	150.000.000
Pembiayaan		500.000.000
pendapatan <i>cash</i> dari pembiayaan dan <i>placement</i> yang akan dibagihasilkan ke nasabah	B	20.000.000

*) Diperhitungkan apabila total penyaluran pembiayaan > total DPK

vi) Tahap I: perhitungan pendapatan per produk

Tabungan (B2)	$\frac{100.000.000 \times 20.000.000}{500.000.000}$	4.000.000
---------------	-----------------------------------------------------	-----------

Tabungan (B3)	$\frac{=300.000.000 \times 20.000.000}{500.000.000}$	12.000.000
---------------	------------------------------------------------------	------------

vii) Tahap II: perhitungan bagi hasil rekening pak Budi:

Bagi hasil tabungan	$\frac{= 10.000.000 \times 4.000.000 \times 35\%}{100.000.000}$ = 140.000,- (belum dipotong pajak)
Bagi hasil deposito	$\frac{= 10.000.000 \times 12.000.000 \times 60\%}{300.000.000}$ = 240.000,- (belum dipotong pajak)

3) Jenis-jenis tabungan

Tabungan BNI Syariah terbagi menjadi 2 yaitu tabungan transaksional yang berfungsi sebagai sarana transaksi nasabah untuk menunjang kegiatan operasional atau usaha nasabah dan tabungan non transaksional yang bukan berfungsi sebagai sarana transaksi nasabah, namun sebagai sarana investasi nasabah⁸. Produk ini bertujuan a. Memberikan layanan kepada masyarakat untuk mengelola dana tabungan simpanan investasi dan transaksi keuangan secara syariah, likuid, fleksibel dan dapat dijangkau oleh jaringan kantor dan *delivery channel* yang luas, b. Memfasilitasi dan menjangkau setiap segmen nasabah secara tepat, baik yang memiliki potensi pengendapan kecil, menengah, maupun besar untuk memiliki rekening di Bank, c. Meningkatkan *market share* dan memperluas *customer base* Bank, dan d. Mengoptimalkan potensi volume Dana Pihak Ketiga yang bersifat murah dalam rangka mendorong penumbuhan aset, laba dan perluasan bisnis. Adapun jenis-jenis tabungan dengan akad *Mudārabah* di BNI Syariah cabang Pangkep ialah sebagai berikut:

a) Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah		
FITUR		KEUNGGULAN
Akad	<i>Mudārabah</i>	
Nisbah bagi hasil (Nasabah:Bank)	18% : 82%	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan transaksi sehari-hari. • Fasilitas E-Banking:

⁸BNI Syariah, *Pedoman Perusahaan Produk Dana: Pendahuluan*, h. 16.

Setoran awal	IDR 100.000	<ul style="list-style-type: none"> Internet Banking Mobile Banking SMS Banking SMS Notifikasi • Fasilitas Hasanah Debit Silver : Penarikan tunai di ATM BNI Setoran tunai di CDM BNI
Saldo minimum	IDR 100.000	
Administrasi / bulan	IDR 7.500	
Pembuatan Hasanah Debit	IDR 5.000	
Biaya Saldo di bawah minimum	IDR 10.000	
Penutupan rekening	IDR 10.000	
Penggantian buku tabungan	IDR 1500	
Penggantian Hasanah Debit	IDR 10.000	

b) Tabungan iB Baitullah Hasanah

iB Baitullah Hasanah			<ul style="list-style-type: none">• Digunakan untuk simpanan ibadah haji reguler, haji khusus, dan Umrah.• Bebas biaya administrasi bulanan.• Perlindungan asuransi kecelakaan diri.• Mendapatkan nomor porsi haji melalui SISKOHAT Kementerian Agama.• Auto debet setiap bulan dari rekening tabungan transaksional• Pembiayaan Haji dan Umrah.• Kartu ATM Haji dan Umroh Indonesia untuk kemudahan transaksi penarikan dan kartu belanja di Saudi Arabia.
FITUR			
Mata Uang	Rupiah	USD	
Akad	Muḍārabah	Muḍārabah	
Nisbah bagi hasil (Nasabah : Bank)	- 10% : 90%	5% : 95%	
Setoran awal	IDR 500 000	USD 50	
Biaya-biaya			
Pengelolaan Rek.			
Tutup Rekening			
Saldo minimum	IDR 500.000	USD 50	
Biaya di bawah saldo minimum			

c) Tabungan iB Bisnis Hasanah

iB Bisnis Hasanah			<div><ul style="list-style-type: none">• Mutasi rekening dicetak dengan narasi pada buku tabungan• Fasilitas E-Banking :<ul style="list-style-type: none">○ Internet Banking○ Mobile Banking○ SMS Banking○ SMS Notifikasi</div>
FITUR			
Akad	Muḍārabah		
Nisbah bagi hasil (Nasabah : Bank)	22% : 78%		
Setoran awal	IDR 5.000.000		
Saldo minimum	IDR 5.000.000		
Administrasi/ bulan	IDR 11.000		
Pembuatan Hasanah	IDR 5.000		

Debit		• Fasilitas Hasanah
Biaya Saldo di bawah minimum	IDR 50.000	Debit Gold :
Penutupan rekening	IDR 100.000	○ Penarikan tunai di ATM BNI
Penggantian buku tabungan	IDR 1.500	○ Setoran Tunai di CDM BNI
Penggantian Hasanah Debit	IDR 10.000	

d) Tabungan iB Prima Hasanah

iB Prima Hasanah		
FITUR		KEUNGGULAN
Akad	<i>Muḍārabah</i>	
Nisbah bagi hasil (Nasabah : Bank)	28% : 72%	• Rekening untuk segment high networth individual
Setoran awal	IDR 25.000.000	• Fasilitas layanan prima
Saldo minimum (dalam 1CIF)	IDR 250.000.000	• Fasilitas executive lounge
Administrasi/bulan	IDR 11.000	• Fasilitas asuransi jiwa
Pembuatan Hasanah Debit	-	• Fasilitas Zamrud Card
Biaya Saldo di bawah minimum	IDR 200.000	• Pre-embossed Hasanah Card
Penutupan rekening	IDR 100.000	Platinum sesuai ketentuan
Penggantian buku tabungan	IDR 1.500	
Penggantian Hasanah Debit	IDR 20.000	

e) Tabungan iB Tapenas Hasanah

iB Tapenas Hasanah		
FITUR		KEUNGGULAN
Akad	<i>Muḍārabah</i>	
Nisbah bagi hasil (Nasabah : Bank)	40% : 60%	• Asuransi otomatis bebas premi
Setoran awal	IDR 100.000	• Manfaat perlindungan asuransi jiwa s.d 1 M
Setoran bulanan	IDR 100.000 s.d 5.000.000	• Tersedia asuransi perlindungan tambahan (Jiwa & Kesehatan) dengan premi 5%, 10%,
Auto Debit setoran bulanan	Setiap tanggal 5	
Jangka waktu	1 s.d 18 tahun	
Biaya-biaya:		
• Administrasi	Rp 500	

• Penggantian buku tabungan	Rp 1.500	dan 20% (Investasi 1,2 dan 3)
• Penutupan rekening	Rp 5.000	
Penutupan sebelum jatuh tempo	IDR 50.000	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dilakukan penarikan setelah kepesertaan min. 1 tahun dengan maks. 3 kali penarikan selama kepesertaan • Dapat dilakukan penyetoran diluar setoran bulanan

f) Tabungan iB Tunas Hasanah

iB Tunas Hasanah				KEUNGGULAN
FITUR				
Akad			Muḍārabah	<ul style="list-style-type: none">• Tabungan untuk anak usia dibawah 17 tahun.• Rekening dan Tunas Card atas nama anak .• Tunas Card dapat menggunakan foto anak (Desain Bebas)• Fasilitas SMS Notifikasi ke nomor handphone orang tua.• Tabungan tetap bisa digunakan saat usia lebih 17 tahun.• kemudahan transaksi penarikan tunai melalui ATM BNI .• Kemudahan transaksi penyetoran tunai melalui ATM BNI .• Kemudahan transaksi transfer melalui ATM BNI
Nisbah	Bagi	Hasil	10% : 90%	
(Nasabah : Bank)				
Setoran Awal			IDR 100 000	
Saldo Minimum			IDR 10.000	
Saldo Blokir Awal			IDR 25 000	
Penutupan Rekening			IDR 25 000	
Administrasi / Bulan			Bebas Biaya	
Pembuatan Tunas Card			Bebas Biaya	
Penggantian Tunas Card			IDR 10.000	
Tunas Card Desain Bebas			IDR 25 000	
Penarikan Melalui ATM/ Hari			IDR 500 000	
Transaksi Belanja / Hari			IDR 500 000	
Transaksi Transfer / Hari			IDR 500 000	
Penggantian Buku Tabungan			IDR 1.500.	

g) Tabungan iB Hasanah Dollar

Tabungan iB Hasanah Dollar		
FITUR		KEUNGGULAN
Akad	Muḍārabah	<ul style="list-style-type: none">• Kemudahan transaksi sehari-hari.• Nasabah dapat bertransaksi dalam mata uang US Dollar.• Nilai bagi hasil yang
Nisbah bagi hasil (Nasabah : Bank)	5% : 95%	
Setoran awal	USD 50	
Saldo minimum	USD 50	
Administrasi / bulan	USD 1	

Biaya Saldo di bawah minimum	USD 2	lebih besar
Penutupan rekening	USD 5	
Penggantian buku tabungan	IDR 1.500	

b. Produk pembiayaan (mikro)

1) Akad Produk

Jenis Akad Pembiayaan Produk Mikro iB Hasanah terdiri dari:

a) Produk Mikro 2 iB Hasanah

Proses akad pembiayaan dilakukan secara bawah tangan, dan wajib dihadiri, dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang berwenang. Secara hukum pengikatan pembiayaan di bawah tangan memiliki konsekuensi sebagai berikut:

- Apabila salah satu pihak menyangkal isi perjanjian tersebut maka pihak yang lain wajib membuktikan kebenarannya.
- Apabila dijadikan alat bukti pengadilan memiliki pembuktian yang lebih kuat

b) Produk Mikro 3 iB Hasanah

Akad pembiayaan yang dilakukan secara legalisasi notaris oleh notaris rekanan dengan menggunakan format Bank dan wajib dibacakan oleh notaris serta penandatangananannya dilakukan dihadapan notaris (tidak boleh diwakilkan oleh staf notaris). Secara hukum pengikatan akad pembiayaan secara legalisasi notaris memiliki konsekuensi sebagai berikut:

- Karena dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris maka notaris bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan akad pembiayaan
- Apabila dijadikan alat bukti di pengadilan, memiliki nilai pembuktian yang cukup kuat.

2) Bentuk dan Akad Pembiayaan

Bentuk pembiayaan *Non revolving* atau penentuan besar pembiayaan dan jangka waktu pelunasan ditentukan di awal akad dan dibayar secara berkala hingga lunas sesuai akad/perjanjian. Sedangkan akad pembiayaan yang diteliti hanya terbatas pada produk pembiayaan dengan akad *Murābahah bi al-Wakālah* dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Mikro BNI 2iB Hasanah

Mikro BNI 2iB Hasanah Segmen Perdagangan	
Nama produk	
Kode produk	695
Plafon pembiayaan	Rp. 5.000.000,-s/d Rp. 50.000.000
Jangka waktu	6 bulan s/d 36 bulan
Margin Bank	Anuitas dan mengacu pada keputusan tarif yang berlaku
Akad	<i>Murābahah</i> dengan <i>Wakālah</i>
Biaya-biaya	Mengikuti ketentuan biaya yang berlaku
Asuransi	Asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan diatur secara terpisah
Metode pencairan pembiayaan	Melalui tabungan Bank BNI Syariah
Pelunasan dipercepat	Diperbolehkan dengan perhitungan nilai yang harus dilunasi oleh nasabah adalah sebesar sisa harga jual (sisa harga pokok + sisa margin yang akan diterima oleh Bank) Pelunasan yang dilakukan untuk keperluan penambahan fasilitas pembiayaan diperbolehkan Pemberian muqosah (<i>discount margin</i>) dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku
Persyaratan Agunan	Tanah, tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan beruoa sertifikat Kios/los/lapak/dasara/lainnya dengan bukti kepemilikan buku stand/kios/los/sejenis. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan bermotor berikut kuitansi jual beli. Bilyet Deposito yang diterbitkan Bank BNI Syariah
Persyaratan Dokumen	Formulir Aplikasi Pembiayaan Copy KTP nasabah dan pasangan (suami/istri) Copy kartu keluarga, akta, nikah/akta cerai/akta kematian/surat kematian/dokumen lainnha Surat Izin Usaha/Surat Keterangan Usaha Surat Kepemilikan stand kios/los pasar Dokumen kepemilikan Agunan Foto calon nasabah dan pasangan (ukuran 4x6

masing-masing 2 lembar) Copy NPWP untuk plafon > Rp. 50.000.000 (sesuai ketentuan pemerintah)

b) BNI Mikro 3 iB Hasanah

BNI Mikro 3 iB Hasanah segmen perdagangan	
Nama produk	
Plafon pembiayaan	>Rp. 50.000.000,-s/d Rp. 500.000.000,-
Jangka waktu	Plafon maksimal Rp. 100.000.000,- tenor 6 – 36 bulan (tujuan investasi penunjang usaha, barang modal kerja, dan konsumtif). Plafon > Rp. 100.000.000,- Rp. 500.000.000,- tenor 6-36 bulan (tujuan barang modal kerja dan konsumtif). Plafon > Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- tenor 6-60 bulan (tujuan investasi penunjang usaha, konsumtif untuk pembelian rumah dan renovasi).
Margin bank	Anuitas dan mengacu pada keputusan tarif yang berlaku
Akad	<i>Murābahah</i> dengan <i>Wakālah</i>
Biaya-biaya	Mengikuti ketentuan biaya yang berlaku
Asuransi	Asuransi jiwa dan asuransi kerugian sesuai dengan ketentuan (diatur secara terpisah)
Metode pencairan pembiayaan	Melalui tabungan Bank BNI Syariah
Pelunasan sipercepat	Diperbolehkan dengan perhitungan nilai yang harus dilunasi oleh nasabah adalah sebesar sisa harga jual (sisa harga pokok + sisa margin yang akan diterima oleh Bank). Pelunasan yang dilakukan untuk keperluan penambahan fasilitas pembiayaan diperbolehkan. Pemberian <i>muqosah (discount margin)</i> dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Agunan	Tanah, tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Kios/los/lapak/dasara/lainnya dengan bukti kepemilikan buku stand/kios/los/sejenis. Buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) kendaraan bermotor berikut kuitansi jual beli. Bilyet deposito yang diterbitkan Bank BNI Syariah.
Persyaratan dokumen	Formulir Aplikasi Pembiayaan

	Copy KTP nasabah dan pasangan (suami/istri) Copy kartu keluarga, akta, nikah/akta cerai/akta kematian/surat kematian/dokumen lainnya Surat Izin Usaha/Surat Keterangan Usaha Surat Kepemilikan stand kios/los pasar Dokumen kepemilikan Agunan Foto calon nasabah dan pasangan (ukuran 4x6 masing-masing 2 lembar) Copy NPWP
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) *Murābahah* emas

Murābahah emas	
Nama produk	
Plafon pembiayaan	Maksimum Ro. 150.000.000
Jangka waktu	24 bulan s/d 60 bulan
Margin bank	Sesuai ketentuan KALMA
Akad	<i>Murābahah</i>
Down payment	20% dari harga pasar
Biaya-biaya	Mengikuti ketentuan biaya administrasi yang berlaku
Metode pencairan pembiayaan	Melalui tabungan Bank BNI Syariah
Pelunasan dipercepat	Minimum dilakukan setelah berjalan 12 (dua belas) bulan
Agunan	Logam mulia (Antam & Non Antam), koin dinar emas yang bersertifikat
Persyaratan dokumen	Formulir aplikasi pembiayaan Copy KTP nasabah COPY NPWP untuk plagon > Rp. 50.000.000,- (sesuai ketentuan pemerintah)
Lain-lain	Wajib kerjasama dengan toko emas (rekanan) dibuktikan dengan PKS.

Skema akad *murābahah* dengan *Wakālah* sesuai syariah (khusus pembeli barang/objek/aset)



- 1) BNI Syariah mengeluarkan surat keputusan pembiayaan (skp)
- 2) Bank BNI Syariah mewakilkan kepada nasabah melalui akad *Wakālah* yang ditandatangani untuk membeli/memesan barang dari pihak ketiga (toko/supplier) dengan melampirkan DRP (daftar rencana pembiayaan) barang
- 3) Atas dasar skp dan akad *wakālah*, nasabah membeli/memesan/komitmen untuk membeli barang kepada pihak ketiga (toko/supplier) dengan meminta nota pembelian *invoice*, kuitansi dan sejenisnya.
- 4) Bank dan calon nasabah melakukan akad *murābahah* secara sah atas pemesanan/pembelian barang. Pada saat penandatanganan akad *murābahah*, calon nasabah melampirkan nota pembelian, *invoice* dan kuitansi dan sejenisnya sebagai bukti pembelian atau bukti *murābahah*
- 5) Dilanjutkan proses pencairan pembiayaan kepada nasabah
- 6) Nasabah membayar barang yang diperjanjikan dibeli kepada pihak ketiga.
- 7) Pihak ketiga mengirimkan barang kepada nasabah
- 8) Nasabah melakukan angsuran pembiayaan (secara bulanan)

- 9) Nasabah meminta bukti lunas dari toko *supplier* atas transaksi *murābahah* yang telah dilakukan dan mengirimkan bukti lunas tersebut kepada bank

Wajib diperhatikan dalam akad *murābahah*

- 1) Akad *murābahah* hanya diperkenankan untuk membeli barang/objek/aset, sedangkan untuk pembiayaan tidak membeli barang/objek/aset (seperti biaya pendidikan, biaya rumah sakit, biaya liburan dll) **TIDAK DIPERKENANKAN** menggunakan akad *murābahah*
- 2) Jika bank mewakili pembelian barang kepada nasabah, maka wajib dilengkapi dengan akad *wakālah*
- 3) Akad *murābahah* dilakukan setelah melakukan pemesanan (pembelian) barang, jika akad *murābahah* dilakukan sebelum pemesanan (pembelian) barang, maka akad *murābahah* tersebut **TIDAK SAH (BATAL)** karena bank menjual barang yang belum dimiliki.
- 4) Pendapatan bank yang diperoleh dari akad *murābahah* yang tidak sah maka pendapatannya **TIDAK DIAKUI**

2. Implementasi Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam pada Produk-Produk Bank BNI Syariah Cabang Pangkep

Secara garis besar nilai-nilai hukum ekonomi Islam telah diterapkan pada produk-produk bank BNI Syariah hal ini nampak jelas dalam ulasan panjang sebelumnya yang memperlihatkan bagaimana bentuk dan proses pengelolaan dari masing-masing produk bank BNI Syariah dan untuk memperjelas hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Amar ma'ruf nahi munkar*

Implementasi nilai *amar ma'ruf nahi munkar* ialah sebagai berikut:

1. Transparansi keuntungan dalam akad pembiayaan mikro, hal ini dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:⁹

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah Akad itu”
(QS. Al-Maaidah ayat 1)

AKAD PEMBIAYAAN MURĀBAHAH
Nomor 00015/860/02/2017/ 12

Pada hari ini Jumat tanggal 29 Desember 2017 yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. DWIPRY ANDICA, Pemimpin Cabang Pembantu Mikro Kantor Cabang KCP PANGKEP PT Bank BNI Syariah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan surat kuasa nomor 380 tanggal 3 Januari 2011, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta nomor 160 tanggal 22 Maret 2010, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2011 nomor 12 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 1455, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 66 tanggal 27 September 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0084212 tanggal 28 September 2016, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BNI Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dengan alamat Jalan H.R. Rasuna Said Kav 10 untuk selanjutnya disebut : **Bank**
- II. _____, sebagaimana bukti Kartu Tanda Penduduk Nomor _____, bertempat tinggal di _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kabupaten _____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut : **Nasabah**

Bank dan Nasabah selanjutnya disebut Para Pihak, bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- Berdasarkan formulir permohonan pembiayaan tanggal 28/12/2017 NASABAH telah mengajukan permohonan pembiayaan Mikro 3 iB Hasanah.
- Berdasarkan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor 00016/860/02/2017/12/SKP tanggal 29/12/2017 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini, Bank telah menyetujui penyaluran pembiayaan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam Akad ini.

⁹Data Kantor Bank BNI Syariah Cabang Pangkep

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat mengadakan Akad Pembiayaan *Murābahah* (untuk selanjutnya disebut Akad) yang didahului oleh Kuasa (*Wakālah*) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

- (1) Akad Pembiayaan *Murābahah* adalah Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada Nasabah dan Nasabah membayar kepada Bank dengan harga jual bank, yaitu harga beli bank ditambah keuntungan yang disepakati.
- (2) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan Akad ini.
- (3) Hari kerja adalah hari-hari dimana Bank beroperasi untuk menjalankan usahanya dan pada saat itu Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar Bank.
- (4) Rekening Pembiayaan adalah rekening yang dibuka oleh Bank untuk mencatat atau mengadministrasikan realisasi dan pembayaran pembiayaan Nasabah.

PASAL 2 PEMBIAYAAN

Harga barang berupa Mobil Fortuner yang dijual Bank kepada Nasabah sebagai pembeli disepakati dan diterima dengan harga Rp. 264.800.000,- (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

• Harga Perolehan	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
• Uang Muka 0%	Rp. 0,- (nol rupiah)
• Harga Beli Bank	Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
• Keuntungan Bank	Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
• Harga Jual Bank	Rp. 264.800.000,- (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Sehingga kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh Nasabah kepada Bank adalah Rp. 264.800.000,- (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Berdasarkan akad tersebut nampak jelas bahwa bank BNI Syariah telah berupaya untuk lebih transparan terkait keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan perbankan konvensional dengan sistem bunga akan mengalami perubahan

mengikuti bunga pasar atau *floating rate*. Hal ini nampak jelas dirasakan bagi para pengguna jasa KPR di perbankan konvensional.

Akan tetapi hal tersebut masih memiliki kekurangan dimana transparansi keuntungan hanya diberlakukan dalam akad *murabahah* tidak dalam akad *mudharabah*, dimana pemilik modal berhak mengetahui jumlah keuntungan yang diperoleh bank yang kemudian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Hal ini harus mendapat perhatian yang lebih agar para nasabah yang berinvestasi pada bank BNI Syariah lebih yakin dengan bagi hasil yang mereka terima.

2. Tidak membiayai usaha yang memperjual belikan barang yang diharamkan oleh agama. Dengan cara menetapkan daftar usaha yang sesuai dengan prinsip syariah meliputi:¹⁰

Perdagangan meliputi	Toko/Agen minyak tanah (terdaftar) Toko Aksesoris wanita Toko Alat elektronik dan listrik Toko Alat tulis kantor Toko Bahan/material bangunan Toko Buku,majalah dan media cetak lainnya Toko kacamata/optik Toko kain,bahan pakaian dan batik Toko kain gorden,karpet,spon/busap Toko kaset,vcd,dvd,cd software (original) Toko kosmetik dan alat kecantikan (original) Toko mainan anak Toko Mas,perak dan perhiasan lainnya Toko meubeller Toko Pakaian Toko Pakan ternak Toko Ponsel, voucher dan aksesorinya Toko saprotan, pupuk dan obat-obatan pertanian Toko obat dan alat kesehatan Apotik Toko Sepatu,tas dan sandal Toko sepeda dan aksesorinya Toko suku cadang kapal dan perlengkapannya Toko suku cadang kendaraan bermotor Toko aksesoris kendaraan bermotor Toko kelontong/toko eceran/warung .Jual beli mobil bekas Jual beli sepeda motor Pedagang air mineral kemasan Pedagang batu alam / levelansir
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹⁰BNI Syariah, *Buku Pedoman Produk Mikro Syariah*, h. 13.

	Pedagang keramik hiasan Pedagang tabu gas (ber-SNI) Pedagang tikar, karpet, sajadah dan sejenisnya
Warung/depot	Rumah makan/restaurant Warung bakso/mie Warung nasi (warteg) warung kopi dan sejenisnya
Pedagang Makanan/Minuman	Pedagang Unggas potong Pedagang daging potong Pedagang rempa-rempah/bumbu Pedagang beras Pedagang ikan segar/ikan kering Pedagang jamu Pedagang madu Pedagang makanan kecil/snack,kue dan roti Pedagang sayur dan buah-buahan Pedagang sembako Pedagang telur
Peternakan	Peternakan sapi Peternakan kambing/domba Peternakan unggas Penggilingan daging sapi dan unggas Pemotonoan daging sapi dan unggas
Manufaktur / Industri	Industri kerajinan kulit Industri kerajinan kuningan Industri kerajinan emas dan perak Industri kerajinan besi Industri kerajinan tanah liat Industri daur ulang karet Industri daur ulang kain Industri daur ulang kertas dan karton Industri daur ulang kayu Industri daur ulang logam (besi,aluminium,dll) Industri daur ulang plastik Industri batubata (bata merah, batako, paving, genting) Industri kerajinan rotan Industri logam pembuatan perangkat masak Industri pembuatan batik Industri pengolahan perkebunan rumput laut Industri pengolahan ikan asin Industri pengolahan makanan dan minuman Industri sepatu Industri komestik dan alat kecanU'kan Industri tas,tekstil dan pakaian Industri pengolahan kayu-limbah kayu Industri pengolahan kayu-furniture Industri pengolahan kayu particle board Industri pengolahan kayu-alat rumah tangga Industri pengolahan kayu-barang kerajinan Industri pengolahan kayu-wood working, kayu, kusen, pintu, jendela, floorin .
Jasa	Jasa advertising Jasa agen perjalanan / travel

	Jasa bengkel bubut Jasa bengkel cat kendaraan bermotor Jasa bengkel dan las Jasa bordir kain Jasa catering Jasa distributor barang Jasa ekspedisi/pengiriman barang/surat/dokumen Jasa kesehatan/klinik Jasa laundry Jasa pangkas rambut Jasa pendidikan/kursus komputer Jasa pengetikan dan pemograman komputer Jasa Penggilingan padi/heuller Jasa kos-kosan Jasa percetakan dan fotocopy Jasa Kontraktor bangunan Jasa sablon Jasa salon dan rias pengantin (khusus muslimah) Jasa pembayaran pulsa/listrik Jasa service alat elektronik Jasa service perbaikan kapal Jasa warung telekomunikasi dan atau warung internet Jasa pengepul rongsokan
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b. *Ta'āwun*,

Implementasi dari nilai *ta'āwun* ialah sebagai berikut:

1. Membantu proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Skala mayoritas usaha penduduk Indonesia berada di sektor mikro. Namun masih menghadapi hambatan usaha, seperti: permodalan. Oleh karena itu sektor mikro membutuhkan jasa perbankan syariah dengan pembiayaan yang fleksibel dan proses yang cepat.
2. Membantu pemilik dana pihak ketiga untuk menyalurkan dananya sesuai dengan tuntunan syariah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam hal pembiayaan dengan akad *mudārabah* (bagi hasil) dan akad *murābahah* kepada penerima bantuan dana.
3. Menerapkan asuransi jiwa bagi para nasabah dan asuransi kebakaran untuk agunan dalam produk pembiayaan mikro hal ini bertujuan jika sewaktu-waktu

nasabah meninggal dunia keluarga yang ditinggalkan tidak perlu khawatir akan sisa hutang yang belum terbayarkan.

Berbeda dengan prakteknya Bank BNI Syariah cabang Pangkep sangat selektif dalam membiayai sebuah usaha yang tidak memiliki agunan yang *marketable* hal ini nampak jelas dalam kebijakan sepihak yang diambil oleh pihak bank untuk tidak menerima agunan dalam bentuk tanah pertambakan/empang hal ini tentu sangat merugikan masyarakat Pangkep dimana mayoritas dari pelaku usaha ialah petani tambak.

Tentu dengan adanya kebijakan tersebut akan mempersulit masyarakat untuk memperoleh bantuan dana sehingga tak heran masih banyak dari mereka yang lebih tertarik dengan perbankan konvensional yang lebih bijak menilai sebuah agunan.

c. Keadilan

Implementasi nilai keadilan dapat diperhatikan dalam uraian sebagai berikut:

1. Menghapuskan denda keterlambatan jika sewaktu-waktu tidak dapat membayar angsuran bulanan tepat pada waktunya, hal ini merupakan bentuk perhatian bank BNI Syariah kepada para nasabahnya yang sewaktu-waktu mengalami penurunan pendapatan yang diakibatkan banyak faktor yang terjadi di lapangan.
2. Mengadakan program *restruktur* pembiayaan bagi para nasabah yang mengalami penurunan pendapatan dengan memperhatikan alasan yang wajar/bukan karena unsur kelalaian. dimana nasabah akan mendapatkan keringanan berupa penurunan jumlah angsuran bulanan dengan catatan jangka waktu pengembalian diperpanjang sesuai dengan sisa jumlah hutang yang belum terbayarkan tanpa adanya tambahan keuntungan (*margin*) oleh bank kepada nasabah dikarenakan bertambahnya jangka waktu.

Berdasarkan hal tersebut dapat dinilai bahwa bank BNI Syariah cabang Pangkep sangat memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat yang sewaktu-waktu dapat mengalami penurunan, berbeda dengan praktek yang diterapkan oleh perbankan konvensional yang masih mengambil keuntungan apabila dilakukan restruktur pembiayaan dengan cara menerapkan suku bunga baru pada sisa hutang yang belum terbayarkan.

d. Non riba

Nilai yang keempat ini merupakan nilai utama dalam sebuah perbankan syariah, karena hal ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya perbankan syariah di Indonesia salah satunya bank BNI Syariah yang memiliki jiwa semangat tinggi untuk memberikan pelayanan masyarakat dalam bidang perbankan yang sesuai dengan tuntunan syariah. hal ini dapat dilihat perbedaan antara perbedaan utang uang dengan utang barang .

Ada dua jenis utang yang berbeda, yaitu utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya meterai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lain yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan oleh sistem perbankan yang menggunakan prinsip syariah.

Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati oleh penjual dengan pembeli. Oleh karena itu, kalau harga jual sudah menjadi kesepakatan, maka selamanya tidak dapat berubah, baik barang itu naik harganya maupun turun. Dalam pelaksanaan transaksi

perbankan syariah yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang.¹¹

Selain itu ajaran Islam mendorong kepada warga masyarakat untuk melakukan praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata dan mendasar. Perbedaan itu, dapat dilihat pada Tabel berikut: ¹²

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau “rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Apabila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Jika diperhatikan kembali perbedaan antara keduanya sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank BNI Syariah lebih menjunjung tinggi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan sistem bunga pada perbankan konvensional, karena sistem tersebut menjanjikan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak bank untung atau rugi.

¹¹Karnaen A. Perwataajmadja, *”Bank yang Beroperasi Sesuai dengan Prinsip Syariah Islam (pengalaman, cara kerja, permasalahan dalam pengembangan dan prestasinya)”* dalam Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 112.

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, h. 112-113.

e. *Non Garār* dalam mendapatkan harta

Nilai yang terakhir ini diimplementasikan dalam pembiayaan mikro dengan memperketat aturan/alur pembiayaan sebagai berikut:

- 1) BNI Syariah mengeluarkan surat keputusan pembiayaan (skp)
- 2) Bank BNI Syariah mewakili kepada nasabah melalui akad *Wakālah* yang ditandatangani untuk membeli/memesan barang dari pihak ketiga (toko/supplier) dengan melampirkan DRP (daftar rencana pembiayaan) barang
- 3) Atas dasar SKP dan akad *Wakālah*, nasabah membeli/memesan/komitmen untuk membeli barang kepada pihak ketiga (toko/supplier) dengan meminta nota pembelian *invoice*, kuitansi dan sejenisnya.
- 4) Bank dan calon nasabah melakukan akad *murābahah* secara sah atas pemesanan/pembelian barang. Pada saat penandatanganan akad *murābahah*, calon nasabah melampirkan nota pembelian, *invoice* dan kuitansi dan sejenisnya sebagai bukti pembelian atau bukti *murābahah*
- 5) Dilanjutkan proses pencairan pembiayaan kepada nasabah
- 6) Nasabah membayar barang yang diperjanjikan dibeli kepada pihak ketiga.
- 7) Pihak ketiga mengirimkan barang kepada nasabah
- 8) Nasabah melakukan angsuran pembiayaan (secara bulanan)
- 9) Nasabah meminta bukti lunas dari toko supplier atas transaksi *murābahah* yang telah dilakukan dan mengirimkan bukti lunas tersebut kepada bank.

3. Respon Nasabah serta Tanggapan Balik Bank BNI Syariah Cabang Pangkep terhadap Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Islam yang Diterapkan pada Produk-Produk Bank BNI Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan objek nasabah Bank BNI Syariah Cabang Pangkep, ditemukan sebuah fakta yang tidak sesuai dengan nilai-nilai

hukum ekonomi Islam yakni: Transaksi jual beli/*murabahah* yang dijalankan antara pihak bank dengan nasabah masih mengandung unsur *garar*.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa nasabah BNI Syariah Cabang Pangkep, bahwa pada saat akad *murabahah* dilakukan barang yang diperjual-belikan belum ada, begitupula pemesanan (pembelian barang yang harus dibuktikan dengan invoice atau nota bukti pembelian dan sejenisnya). Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang dari nasabah BNI Syariah yang telah melakukan akad *murabahah bi al-wakalah* dengan tujuan modal usaha. Bapak Mursidi Makkah mengatakan:

Tidak ada pemesanan barang atau bukti pembelian barang sebelum akad terjadi, dan pelaksanaannya kurang lebih sama dengan yang dipraktekkan di Bank Konvensional sedangkan biaya-biaya yang timbul dari akad tersebut dipotong setelah dana pembiayaan tersebut dicairkan.¹³

Bahkan nasabah tersebut mengatakan bahwa bunga yang diistilahkan margin oleh BNI Syariah secara kalkulasi sama dengan bunga di Bank Konvensional.

Pada dasarnya sebelum akad *murabahah* dilaksanakan akad *Wakalah* harus dijalankan terlebih dahulu, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku pedoman pembiayaan Bank BNI Syariah, hal ini juga dijelaskan oleh Wiroso dalam bukunya Produk Perbankan Syariah bahwa¹⁴ *murabahah* diwakilkan pada prinsipnya dalam transaksi *murabahah*, yang bertanggung jawab untuk pengadaan barang adalah bank syariah sebagai penjual, namun dalam praktek banyak bank syariah yang pengadaan barangnya diwakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri sehingga banyak bank syariah yang tidak terlibat dalam pengadaan barang, bank menyerahkan uang atau memberikan uang kepada nasabah, dengan alasan nasabah sebagai wakil bank syariah untuk membeli barang kebutuhannya sendiri. Berkaitan

¹³Mursidi Makka (46 tahun), Nasabah Mikro 3 Bank BNI Syariah KCP Pangkep, *Wawancara*, Pangkep, 29 Maret 2018.

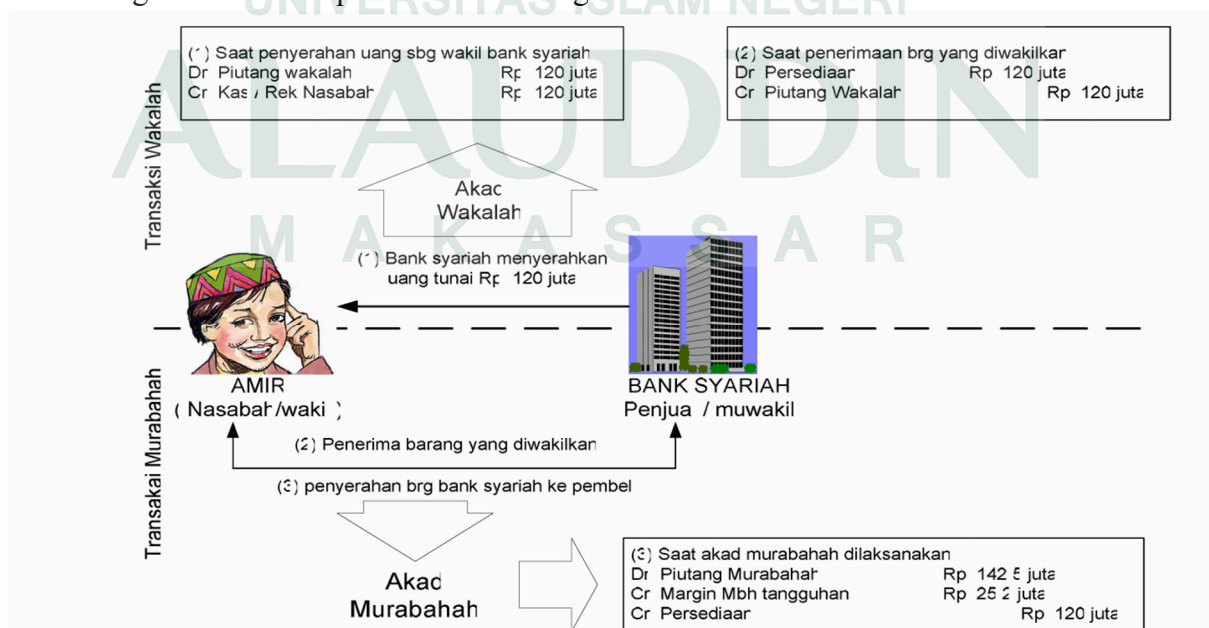
¹⁴Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: UPFE Usakti, 2009), h. 215-219.

dengan hal ini Fatwa Dewan Syariah Nasional: 04 DSN MUI/ IV/ 2000 tentang *Murābahah* menyatakan sebagai berikut:

Jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Dari fatwa ini jelas bahwa bank syariah tidak diperkenankan untuk melakukan akad *murābahah* kalau barangnya tidak ada, karena timbul *garar* (ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan). Hal ini jelas hadisnya yang mengatakan tidak diperkenankan untuk menjual burung yang masih terbang, menjual ikan dalam lautan dan menjual akan binatang dalam kandungan. Saat bank syariah menyerahkan uang sebagai wakil bank syariah, maka akad yang dipergunakan adalah akad *wakālah*. Setelah barang ada, baru dilakukan akad *murābahah*. Untuk memberikan ilustrasi *murābahah* yang diwakilkan kepada nasabah, diberikan contoh sebagai berikut:

Bank Syariah melakukan transaksi *murābahah* dengan Amir atas Mobil Inova dengan harga mobil Rp. 120.000.000,. Keuntungan disepakati sebesar Rp.25.200.000. Pembayaran dilakukan secara tangguh selama satu tahun. Bank Syariah menyerahkan uang ke Amir sebesar Rp. 120.000.000, sebagai wakil Bank Syariah untuk membeli mobil Inova untuknya.

Dari contoh tersebut dapat digambarkan alur *murābahah* dengan pengadaan barang diwakilkan kepada nasabah sebagai berikut:



Dari gambar ini terdapat dua transaksi dengan prinsip yang berbeda yaitu, *wakālah* dan *murābahah* yang dapat dijelaskan lebih lanjut berikut:

- I. Saat Bank Syariah menyerahkan uang sebesar Rp. 120 juta kepada Amir (nasabah), barang yang diperjual belikan belum ada sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan akad *Murābahah*. Atas penyerahan uang tersebut akad yang dipergunakan adalah akad *Wakālah* dan hutang nasabah kepada Bank Syariah hanya sebesar uang yang diterima yaitu sebesar Rp. 120.000.000, Dalam memberikan amanah untuk mewakilkan harus jelas atas yang diwakilkan. Bahkan seharusnya nasabah yang menerima kuasa (sebagai wakil bank) menerima upah atas pekerjaan yang dilakukan.
- II. Atas amanah yang diberikan oleh Bank Syariah, Amir nasabah melakukan pembelian atau pengadaan barang sesuai yang diwakilkan, dan kemudian diserahkan kepada Bank Syariah. Dengan penyerahan barang yang diwakilkan tersebut kewajiban nasabah selesai dan hutang nasabah diperhitungkan, jika terdapat sisa dikembalikan nasabah kepada bank syariah, sebaliknya jika kurang bank syariah harus menambah atau mengembalikan kekurangannya kepada nasabah.
- III. Setelah barang dalam penguasaan Bank Syariah, maka akad *murābahah* dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan syariah yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan disetujui transaksi ini dengan akad *murābahah*, maka hutang nasabah kepada bank syariah sebesar harga jual yaitu sebesar Rp. 145.200.000,

Dari ilustrasi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- i. Akad *wakālah* dilakukan atau terjadi sebelum akad *murābahah*
- ii. Akad *wakālah* gugur (tidak berfungsi) begitu timbul akad *murābahah*.

- iii. Tanda Terima Uang oleh Nasabah melekat pada akad *wakālah*, sedangkan Tanda Terima Barang melekat pada akad *murābahah*.
- iv. Akad *wakālah* hutang nasabah sebesar uang yang diterima sedangkan akad *murābahah* hutang nasabah sebesar harga jual ankok ditambah keuntungan).

Berikut diberikan ilustrasi risiko yang harus ditanggung oleh bank syariah, jika pengadaan barang *murābahah* diwakilkan, yaitu pada saat terjadi piutang bermasalah dalam *murābahah*. Dalam praktek yang dilakukan adalah "akad *wakālah*" dan "akad *murābahah*" ditanda tangani bersama, uang tunai diserahkan kepada Amir (nasabah) sebesar Rp.120.000.000, dan nasabah diberikan jadwal angsuran sebesar Rp.145.200.000,. Jika hal ini dilakukan, maka tidak ada perbedaan antara *murābahah* dengan kredit pada perbankan konvensional, yang berbeda hanya terletak pada akadnya saja. Bagi nasabah yang memahami prinsip syariah, dari jadwal pembayaran yang diterima tidak dilakukan pembayaran angsuran, sehingga pihak bank syariah melakukan penagihan dengan dialog singkat sebagai berikut:.

Bank Syariah : "Kenapa bapak tidak melakukan pembayaran angsuran. Apakah Bapak mengalami kesulitan keuangan ?"

Amir (nasabah) : "Angsuran apa dik"

Bank Syariah : "Angsuran mobil pak"

Amir : "Siapa yang beli mobil dik"

Bank Syariah : "Ya Bapak, Tiga bulan yang lalu Bapak kan terima uang sebesar Rp.120 juta dari kami untuk membeli mobil"

Amir : "Betul dik, saya terima uang dari anda sebesar Rp. 120 juta tetapi saya tidak pernah belikan mobil. Oleh karena itu kalau adik ingin meminta kembali uangnya ini saya buka Cek sebesar Rp.120 juta, tolong uangkan pada bank saya"

Bank Syariah : "Ya nggak bisa begitu pak, Bapak sudah membayar sebesar Rp. 145.200.000, sesuai angsuran"

Amir : "Dalam ekonomi Islam uang hanya sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, uang tidak diperkenankan untuk diperdagangkan sebagai komoditi. Kenaikan uang hanya diperkenankan jika diikuti dengan kegiatan ekonomi yang nyata, seperti jual beli barang, sewa barang, dan investasi. Bukannya begitu dik"

Bank Syariah : "Terima kasih pak, Ass wr wb"

Dari ilustrasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap akad *murābahah* harus didukung dengan bukti jual beli barang (pada saat akad *murābahah* barangnya harus ada ini yang perlu dibuktikan walaupun setelah akad barang tersebut dijual oleh nasabah sebagai pembeli)

Hal serupa juga dinyatakan oleh Saenuddin bahwa ketika akad *murābahah* ditandatangani ia sebagai nasabah sekaligus pembeli tidak menerima barang ataupun melakukan pembelian (pemesanan barang) sebelumnya, bahkan dana dari pencairan pembiayaan tersebut dengan tujuan renovasi kandang ayam yang bersifat konsumtif masih tersisa meski kandangnya telah selesai.

Berdasarkan respon tersebut Bapak Dwipry Andica selaku Pimpinan Unit Mikro KCP Pangkep mengatakan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa akad *murābahah bi al-wakālah* belum dapat dijalankan secara maksimal antara lain:¹⁵

1. Pemenuhan target bulanan dan tahunan akan sulit tercapai jika harus mengikuti seluruh langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

¹⁵Samsu Alam (36 tahun), Analis Pembiayaan Mikro Bank BNI Syariah KCP Pangkep, Wawancara, Pangkep, 29 Maret 2018.

2. Nasabah yang tertutup/kurang terbuka dan kurang jujur perihal tujuan pembiayaan yang diajukan.
3. Tuntutan nasabah yang mengharuskan dana pembiayaan cair secepat mungkin.

Akan tetapi Bapak Samsu Alam selaku Analis Pembiayaan Mikro menegaskan¹⁶ bahwa faktor lain mengapa nilai-nilai hukum ekonomi Islam belum bisa diterapkan, dikarenakan pegawai Bank BNI Syariah Cabang Pangkep secara khusus belum paham hakikat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli *garar* ditambah dengan kurangnya pemahaman para nasabah terkait akad *murabahah bi al-wakalah*.

Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, harus ada evaluasi kerja secepatnya oleh Pimpinan Area Mikro bersama audit internal terhadap kinerja para Pimpinan Unit dan karyawan yang berada di bawah jajarannya. Karena sebuah lembaga sangat memerlukan seorang pemimpin yang ideal sebagai panutan berperilaku dan bekerja terutama di sebuah lembaga keuangan syariah.

Mengingat jumlah anggota DPS di setiap lembaga keuangan syariah yang sangat sedikit dituntut untuk bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman tentu tidaklah mudah, apalagi pengawasan yang dilakukan oleh DPS dilakukan secara periodik tentu akan mempermudah terjadinya pelanggaran terkait implementasi nilai-nilai dan prinsip syariah Islam.

Hal serupa juga disampaikan oleh Adiwarmanto Karim dalam sebuah artikel dengan judul Para Pejuang Ekonomi Syariah, bahwa tidak mudah untuk bertanggung jawab atas pengawasan syariah mengingat demikian kompleksnya transaksi perbankan. Menimpakan beban berat ini hanya kepada Dewan Pengawas Syariah

¹⁶Dwipry Andica (34 tahun), Pimpinan Unit Mikro Bank BNI Syariah KCP Pangkep, Wawancara, Pangkep, 29 Maret 2018.

bukanlah cara yang realistis. Pengawasan syariah sepatutnya merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholders*. Selain Dewan Pengawas Syariah yang bertanggung jawab pada aspek syariahnya, maka untuk aspek Operasional pengawasan syariah paling tidak harus dilakukan oleh audit internal bank, direktur kepatuhan, bahkan komisaris harus ikut menjaga kepatuhan syariah. Audit eksternal yang dilakukan oleh kantor akuntan publik juga tidak boleh melewatkan begitu saja adanya pelanggaran atas kepatuhan syariah. Dan tentunya Bank Indonesia bertanggung jawab sebagai pemegang otoritas perbankan. Semua institusi ini sesuai kompetensi dan wewenangnya masing-masing harus bahu-membahu menjalankan fungsi pengawasan syariah.¹⁷

Terkait dengan para pegawai yang belum paham hakikat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli *garar* perlu diadakan assesment yang lebih dalam tentang konsep dan akibat hukum yang diperoleh dari pelanggaran prinsip-prinsip syariah Islam. Karena sejauh ini assesment yang dilakukan hanya seputar masalah produk. Sedangkan bagi para calon nasabah perlu diadakan kursus mengenai alur pembiayaan syariah agar masyarakat dapat memahami perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang akan diakhiri dengan penandatanganan surat pernyataan akan patuh dan tunduk terhadap aturan perusahaan yang berlandaskan syariah Islam.

Adapun masalah perlindungan hukum bagi konsumen, hal ini perlu dimuat dalam aturan yang lebih matang terkait hubungan antara pihak Bank selaku pengelola dan Nasabah selaku investor dalam akad *muḍārabah*. Hal ini tentu sangat urgen dimana investor sangat mengharapkan perbedaan yang akan diperoleh melalui bagi hasil yang diberikan oleh perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang

¹⁷Muhammad Firdaus NH, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 35.

tentunya diharapkan akan mendapatkan keuntungan yang halal berdasarkan konsep syariah yang bersumber dari al-Quran dan al-hadis bukan usury/riba yang diperoleh dari sistem bunga.

Hal ini bertujuan agar para investor dapat menjadi pengawas terhadap kegiatan perbankan tersebut. Jika sewaktu-waktu terjadi penyalahgunaan kekuasaan atas dana pihak ketiga yang dikelola diluar alur pembiayaan syariah.

Hal ini mengingatkan pernyataan dalam buku pedoman perusahaan Bank BNI Syariah yang menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah yang dituangkan dalam alur pembiayaan tidak akan dihitung sebagai keuntungan/income. Hal ini tentu akan merugikan para investor yang telah percaya kepada pihak bank selaku pengelola dana.

Selain hal itu perlu adanya sanksi yang diberikan terhadap pihak bank selaku pengelola dana yang dengan sengaja melanggar aturan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah serta bagaimana bentuk pertanggung jawabannya terhadap para investor. Hal ini tentu perlu dituangkan dalam akad mengingat Bank BNI Syariah adalah perbankan syariah bukan perbankan konvensional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk-produk Bank BNI Syariah KCP Pangkep secara garis besar terbagi menjadi dua, yakni produk dana yang berfokus pada segmen tabungan yang dikelola menggunakan sistem bagi hasil (*muḍārabah*) dan produk pembiayaan mikro yang dikelola dengan sistem jual-beli dengan akad *murābahah/murābahah bi al-wakālah* dengan uaraian bahwa pihak Bank menerima dana dari pihak ketiga yang akan dikelola dalam bentuk pembiayaan menggunakan akad jual-beli (*murābahah/murābahah bi al-wakālah*) yang kemudian hasil/keuntungan dari jual-beli tersebut akan dibagi kepada pemilik dana pihak ketiga sesuai nisbah bagi hasil yang tertuang dalam akad *muḍārabah*.
2. Nilai-nilai hukum ekonomi Islam secara umum telah diterapkan pada produk-produk bank BNI Syariah Cabang Pangkep. Nilai-nilai tersebut yakni antara lain: a. *Amar ma'rūf nahyi munkar* yang diimplementasikan dengan cara melakukan transparansi keuntungan dalam akad pembiayaan mikro serta tidak membiayai usaha yang memperjual belikan barang yang diharamkan oleh agama, b. *Ta'āwun*, yang diimplementasikan dengan cara membantu proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional, serta menerapkan asuransi jiwa bagi para nasabah dan asuransi kebakaran untuk agunan dalam produk pembiayaan mikro, c. Keadilan, yang diimplementasikan dengan cara menghapuskan denda keterlambatan jika sewaktu-waktu tidak dapat membayar angsuran bulanan tepat pada waktunya dengan alasan yang wajar serta Mengadakan program restruktur pembiayaan bagi para nasabah yang mengalami penurunan pendapatan dengan memperhatikan alasan yang wajar/bukan karena unsur kelalaian. d. Non riba, yang diimplementasikan dengan cara menggunakan

sistem bagi hasil (*muḍārabah*) pada produk dana dan menggunakan akad *murābahah/murābahah bi al-wakālah* pada produk pembiayaan, dan e. Non *garār* dalam mendapatkan harta yang diimplementasikan dengan cara memperketat alur pembiayaan agar barang yang diperjualbelikan dapat dipastikan telah menjadi milik bank baik secara langsung maupun secara prinsip sebelum dilakukan akad *murābahah*.

3. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan satu dari lima nilai-nilai hukum ekonomi Islam tersebut belum diterapkan pada produk-produk Bank BNI Syariah Mikro KCP Pangkep mengingat masih terdapat unsur *garār* dalam produk pembiayaan mikro. dimana pihak bank selaku penjual memperjualbelikan suatu objek barang yang belum dimiliki baik secara langsung maupun secara prinsip. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain. 1. Pemenuhan target tahunan yang susah dicapai, 2. Nasabah yang kurang jujur dan tertutup perihal tujuan pembiayaan yang diajukan, 3. Nasabah yang menuntut pencairan secepat mungkin. dan 4. Pegawai Bank BNI Syariah Cabang Pangkep secara khusus belum memahami hakikat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari jual beli *garār* ditambah dengan kurangnya pemahaman para nasabah terkait akad *murābahah bi al-wakālah*. Sehingga proses pembiayaan dengan alur yang telah ditentukan tidak dapat dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

B. Implikasi

Implementasi yang diharapkan dari penulisan tesis ini ialah 1) Agar Dewan Pengawas Syariah (DPS) lebih intens mengawasi lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, 2) Agar Pimpinan Area Mikro BNI Syariah Cabang Makassar bersama audit internal dengan segera dapat melakukan evaluasi kerja para Pimpinan Unit dan karyawan yang berada di bawah jajarannya serta saling bahu-membahu menjalankan fungsi pengawasan syariah, 3) Agar materi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lebih diperdalam melalui assesment yang diberlakukan bagi karyawan BNI Syariah khususnya BNI Syariah Mikro Cabang Pangkep.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Fyzee, Asaf. *Outlines of Muhammadan Law*. Edisi 4. Delhi-Bombay-Calcutta-Madras: Oxford University Press, 1974.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pustaka Setia, t.th.
- Al-Ghazālī, Abū Hāmid. *Al-Mustashfā fī 'Ilm al-Uṣūl*. Jilid I. Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1993.
- Ali, Lukman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Al-Qazwinī, Imām Muhammad bin Yazīd Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. vol. 5. Riyadh: Maktab Dār al-Salām, 2007.
- Al-Sijistān, Abu Dāud Sulaimān bin al-Asy'at. *Sunan Abu Dāud*. Juz 2. Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Antonio, M. Syafi'i. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Cet. IV; Jakarta: Pustaka Alfabeta, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*. Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- , *Pengantar Hukum Islam I*. Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- , *Penelitian Kualitatif*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- , *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi 5. Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Direktorat Perbankan Syari'ah Bank Indonesia, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syari'ah*. Jakarta: t.p, 2011.
- H, Soemitro Romy. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Halidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*. Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Hasan, Ahmad. *The Doctrine of Ijma' in Islam: A Study of the Judicial Principle of Consensus*. Cet. I; Delhi: Kitab Bhavan, 1992.
- , *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Cet. II; Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1984.
- , *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari'ah and Juridical Norm*. vol. 1. Cet. I; Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994.

- Ibn Ya'qūb al-Fairūzābādiy, Muhammad. *Al-Qāmūs al-Muhīth*. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Imam Syafi'i, *Al-Risalah*. terj. Ahmadie Thoha. Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- JS, Badudu dan Muhammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: LPMQ, 2016.
- Khalid Mas'ud, Muhammad. *Islamic Legal Phylosophy: A Study of Abu Ishaq al Shatibi's Life and Thought*. Cet. I; Delhi: International Islamic Publishers, 1989.
- Lewis, Marvin K. dan Latifa M. Algaud. *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek, Prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Marzuki. *Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam*.
<http://Dr.Marzuki.M.Ag.TinjauanUmumTentangHukumIslam.com.pdf>. 29 November 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhammad 'Ajjāj al-Khathīb, *'Ulūm al-Hadīs 'Ulūmuhu wa Mushthalāhuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: PP. Al- Munawwir Krapyak, 1984.
- Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System*. Cet. I; Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- N.J. Coulson, *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Nasutio, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nasution, S. *Metode Naturalistik Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Rahman, Fazlur. *Islam*, terj. Ahsin Muhammad. Cet. I; Bandung: Pustaka, 1984.

- Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Schacht, Joseph. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. London: Oxford at the Clarendon Press, 1950.
- Siradjuddin, *Peran Umara dan Ulama dalam Pengembangan Perbankan Syari'ah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Cet. II; Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharso. Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Lux. Semarang : CV.Widya Karya, t.th.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syaltūt, Mahmūd. *Al-Islām Aqīdat wa Syarī'ah*. Cet. III; Kairo: Dār al-Qalam, 1966.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Cet. II; Padang: Angkasa Raya, 1993.
- . *Ushul Fiqh*, Jilid 1. Cet. I; Jakarta: Logos, 1999.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Askara, 2004.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Wahhāb Khallāf, ‘Abdul. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Cet. VII; Kairo: Dār al-Qalām li al-Tibā’at wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1978.
- Wibowo, Edy, dkk. *Mengapa Memilih Bank Syari'ah?*. Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah Berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2005.
- Yūsuf Mūsā, Muhammad. *Al-Islām wa al-Hājat al-Insāniyyat Ilaih (Islam Suatu Kajian Komprehensif)*, terj. A. Malik Madani dan Hamim Ilyas. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1988.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.